

**PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
(Studi Kasus Di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah)**



**Tesis
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat sarjana S2 pada
Program Studi Ilmu Lingkungan**

**Muhamad Nur'arif
L4K007008**

**MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

TESIS

**PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
(Studi Kasus Di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah)**

Disusun oleh

**Muhamad Nur'arif
L4K007008**

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hartuti Purnaweni, MPA

Ir. Syafrudin, CES, MT

Mengetahui :
Ketua Program
Magister Ilmu Lingkungan,

Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

LEMBAR PENGESAHAN**PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
(Studi Kasus Di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah)**

Disusun oleh

**Muhamad Nur'arif
L4K007008**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 1 Agustus 2008
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Ketua :

Tanda Tangan

Dra. Hartuti Purnaweni, MPA

.....

Anggota :

1. Ir. Syafrudin, CES, MT

.....

2. Ir. Agus Hadiyanto, MT

.....

3. Dra. Sri Suryoko, M.Si.

.....

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Magister Ilmu Lingkungan seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, Juli 2008

Muhamad Nur'arif

BIODATA PENULIS



Lahir di Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 1968, merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Menyelesaikan pendidikan dasar pada SD Negeri 02 Kawo Tahun 1980, selanjutnya pada Tahun 1983 tamat sekolah lanjutan pertama pada SMP Negeri 1 Pujut dan pada Tahun 1986 menamatkan sekolah lanjutan atas pada SMA Negeri 1 Praya. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Pertanian Universitas Mataram Jurusan Budidaya Pertanian Program Studi Pemuliaan Tanaman dan lulus pada Bulan September Tahun 1991. Sejak Agustus 1994 hingga September 1997 bekerja sebagai Sarjana Pendamping Purna Waktu (SP2W) Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) di bawah pembinaan Bappenas dan Departemen Dalam Negeri. Pada tanggal 1 Oktober 1997 diangkat sebagai CPNS Pusat sebagai staf pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa di Kabupaten Sumbawa Propinsi NTB. Sejak Tahun 2001 pindah ke Kabupaten Lombok Tengah dan menjadi staf di Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah. Jabatan yang pernah diduduki Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa pada Kantor Camat Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa dan Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan pada Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah. Pendidikan non gelar atau kursus yang pernah diikuti adalah Amdal Tipe A, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan AMDAL Penilai (tipe C). Pada Tahun 2007 mendapat kesempatan tugas belajar pada Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang dengan sistem pembiayaan *cost sharing* antara pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan Pusbindiklatren Bappenas.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga dengan semangat yang ada penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KOTA (Studi Kasus di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat)".

Penulis menyadari, bahwa tanpa dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, penulisan tesis ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pusat Pembinaan Pendidikan dan Latihan Perencana (Pusbindiklatren) Bappenas yang telah memberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan beasiswa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar.
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang telah memberikan ijin mengikuti tugas belajar pada Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro yang telah menyelenggarakan Program Studi Ilmu Lingkungan
4. Ibu Dra. Hartuti Purnaweni, MPA. Dan Bapak Ir. Syafrudin, CES, MT, masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan serta dorongan kepada penulis.
5. Bapak Ir. Agus Hadiyanto, MT dan Ibu Dra. Sri Suryoko, M.Si. selaku penguji
6. Ayahanda dan almarhumah Ibunda, Istri dan anak-anakku tercinta serta saudara-saudaraku yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menempuh studi.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga bantuan dan dorongan semua pihak senantiasa mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan khasanah pengetahuan khususnya dalam pengelolaan air limbah domestik.

Semarang, Juli 2008

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
BIODATA PENULIS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
ABSTRACT.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Perencanaan	7
2.2 Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8
2.2.1 Partisipasi.....	8
2.2.2 Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15
2.3. Pengelolaan Lingkungan.....	16
2.4. Karakteristik Limbah Kota.....	19
2.5. Sanitasi di Wilayah Pemukiman	20
2.5.1. Aspek Regulasi.....	21

	41
2.5.2. Peran Para Pihak (Stakeholders)	22
2.6. Pola Pengelolaan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat	24
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Tipe Penelitian	26
3.2 Lingkup Penelitian	26
3.3 Sumber dan Jenis Data	27
3.4 Aspek yang Diamati	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Populasi Penelitian	30
3.7 Penentuan Daerah Sampel	31
3.8 Teknik Analisis	31
3.9 Kerangka Alur Penelitian	32
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.1.1. Geografi dan Kependudukan	33
4.1.2. Sosial	34
4.1.3. Ekonomi	35
4.1.4. Lingkungan	36
4.2. Kondisi Pengelolaan Air Limbah Domestik	39
4.2.1 Kebiasaan Masyarakat Dalam Mengelola Limbah Cair Rumah Tangga	39
4.2.2 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	42
4.2.3 Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah Domestik	44
4.2.4 Ketersediaan Sumber Daya Pengelolaan Air Limbah	49
4.2.5 Sumber Air Bersih yang Digunakan Masyarakat	50
4.2.6 Keberadaan Lembaga-Lembaga Lokal	51
4.2.7 Kelembagaan dan Kebijakan	52
4.2.8 Persepsi Masyarakat	56
4.2.9 Tingkat Partisipasi Masyarakat	63
4.2.10 Mekanisme Perencanaan Pembangunan	66
4.3. Analisis Kondisi Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Praya....	67

	42
4.3.1 Analisis Persepsi dan Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	67
4.3.2 Kelembagaan dan Kebijakan	72
4.3.3 Analisis Teknologi Pengelolaan Air Limbah Domestik	75
4.4. Analisis Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	76
4.4.1 Identifikasi Masalah.....	76
4.4.2 Formulasi Tujuan.....	77
4.4.3 Penilaian Situasi/Analisis Kondisi.....	77
4.4.4 Alternatif Kebijakan	81
4.4.5 Skala Prioritas Kebijakan/Rekomendasi.....	82
V. PENUTUP	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Rata-rata Aliran Air Limbah dari Daerah Pemukiman	3
3.1 Jumlah informan yang diwawancarai.....	29
3.2 Jumlah responden dari masing-masing kelurahan lokasi penelitian	29
4.1 Luas Kelurahan dan Jumlah penduduk di Kota Praya Tahun 2006	34
4.2 Jumlah Keluarga menurut Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga Di Kota Praya Tahun 2006.....	35
4.3 Hasil Uji Laboratorium Air Bendungan Batujai dan Air Sungai Yang Melintasi Kota Praya	38
4.4 Jumlah Jamban Pribadi dan Jamban Umum di Kota Praya	47
4.5 Jumlah Saluran PDAM dan Sumur Gali di Kota Praya	51
4.6 Matrik SWOT	84
4.7 Matrik Matrik Kondisi Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Permasalahanya serta Rekomendasi Pengelolaann	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar	
Halaman	
1.1 Peta Kota Praya.....	2
3.1 Kerangka Alur Penelitian.....	32
4.1 Peta Kota Praya.....	33
4.2 Peta Jaringan Jalan dan DrainasePertumbuhan Eceng Gondok Bnedungan Batujai di Muara Sungai	41
4.3 Skema Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik di Kota Praya.....	43
4.4 Septiktank Komunal Dengan Kondisi Tergenang air Bendungan Batujai...	40
4.4 Kali yang melintasi Kota Praya yang dijadikan sebagai prasarana pembuangan air limbah domestik	40
4.5 Prasarana Saluran Drainase Kota yang dipakai sebagai tempat pembuangan air limbah domestik di Kota Praya	41
4.6 Pembuangan air limbah domestik yang memanfaatkan pekarangan rumah	41
4.7 Pembuangan Air Limbah Domestik yang memanfaatkan got	42
4.8 Persentase KK yang memiliki jamban pribadi.....	43
4.9. Perbandingan Jumlah KK dengan Jumlah Jamban Pribadi dan Jamban Umum	44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A Skema pelaksanaan wawancara pengelolaan air
Limbah domestik di Kota Praya
- Lampiran B Panduan Wawancara
- Lampiran C Tabulasi data hasil jawaban kuesioner
- Lampiran D. Foto-foto dokumentasi kegiatan

DAFTAR ISTILAH

- Bebeleng : merupakan bahasa daerah dari suku sasak yang artinya sama dengan air limbah domestik
- BOD₅ (Biological Oxygen Demand) merupakan ukuran jumlah zat organik yang dapat dioksidasi oleh bakteri aerob/jumlah oksigen yang digunakan untuk mengoksidasi sejumlah tertentu zat organik dalam keadaan aerob.
- COD : Chemical Oxygen Demand merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bahan oksidan untuk mengoksidasi bahan-bahan organik yang terdapat di dalam air
- RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
- Tuan Guru : Tokoh agama yang merupakan panutan kuat masyarakat Pulau Lombok sama dengan seorang kyai di Pulau Jawa

ABSTRACT

Domestic waste water is one of urban problems that results in complicated issues. However it is almost forgettable by either society or government. Indeed, it does not mean that there is not any attention or management, but instead the management is inadequately identified. Such condition occurs in Lombok Tengah Regency, part of Nusa Tenggara Barat Province. According to this raising issue, this study attempted to exercise a case study on to what extent domestic waste water in Praya city has been overcome.

Method of research used in this study was a qualitative analysis. Data obtained were by interview and field study subject to an analysis in order to find out people participation, institutions, government regulations and policies, funding and implementation of the management of the domestic waste water in Praya City. The study applied a SWOT analysis to determine strategies and policies in generating plans of the domestic waste water.

According to the analysis, the study found that the management of the domestic waste water in Praya City was limited to waste disposal to urban drainage, home yard, and rivers due to the absence of waste water management, concern regulation, and people understanding about the adverse effect of the domestic waste water on water pollution. The study also found that local government had not been occupied by local acts and conducts related to domestic waste water so that there were overlaps between institutions. Besides, the implementation of the environmental sanitation programs has not integrated the management of water resource and environment, the implementation of domestic waste water management was not participatively performed so that the water management infrastructures were not fully profitable to the local people.

The SWOT analysis results recommended such efforts as domestic waste water using an on-site system for a short-term project and off-site system for a long-term project by involving direct participation of the local people. In addition, the analysis results also recommended local acts concerning domestic waste water integrated to water resources management under legal concerns, which deals with the management of the domestic waste water. In order to promote the local people participation in the management of domestic waste water, there should be a maximum role of so called *tuan guru* as local leaders supported by Non Governmental Organisations (NGO). Finally, lack of funds in the management of the domestic waste water can be overcome by seeking alternative fundings outside the Local Income Budget (APBD) through a triad combination between agencies : government, private sectors and society.

Key word : Management, Domestic Waste Water, Praya City NTB

ABSTRAK

Air limbah domestik merupakan salah satu permasalahan kota yang kompleks, tetapi nyaris terkesampingkan dan tidak terkelola apalagi menjadi prioritas oleh publik maupun pemerintah. Bukanlah berarti tidak ada sama sekali perhatian atau penanganan, namun pengelolaannya masih dapat teridentifikasi diselenggarakan dalam pencapaian yang tidak memadai. Kondisi ini terjadi di Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk itu telah dilakukan studi kasus tentang sejauh mana pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan dianalisis untuk mengetahui partisipasi masyarakat, kelembagaan, peraturan dan kebijakan pemerintah, pembiayaan dan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya. Selanjutnya dalam rangka menentukan strategi dan kebijakan dalam penyusunan perencanaan pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya dilakukan juga analisis SWOT.

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya oleh masyarakat hanya sebatas pembuangan ke saluran drainase kota/got, pekarangan dan sungai/kali yang dilakukan karena tidak adanya pelayanan pengelolaan air limbah, tidak adanya larangan, biayanya murah, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak air limbah domestik terhadap pencemaran air. Di pihak pemerintah ditemukan beberapa hal antara lain belum adanya peraturan daerah terkait pengelolaan air limbah domestik, di samping pelaksanaan tupoksi instansi terkait pengelolaan air limbah domestik sering tumpang tindih kegiatan antara instansi yang satu dengan yang lain. Selain itu pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota Praya belum mengintegrasikan pengelolaan sumber daya air dan lingkungan. Pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik belum dilakukan secara partisipatif sehingga prasarana pengolahan air limbah domestik yang ada tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis SWOT maka langkah-langkah yang perlu diambil dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya adalah mengupayakan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem *on-site* karena dinilai masih relevan. Ke depan pengolahan dengan sistem *off-site* terus diupayakan secara terencana dengan melibatkan peran serta masyarakat. Selain itu penyusunan peraturan perundang-undangan daerah yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik yang terintegrasi dengan pengelolaan sumber daya air juga perlu dibuat sebagai payung hukum dalam pengelolaan air limbah domestik. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, perlu mengakomodir peran *tuan guru* sebagai panutan kuat masyarakat serta pendampingan oleh LSM. Dalam rangka mengatasi kekurangan dana dalam pengelolaan air limbah domestik perlu mencari alternatif pembiayaan di luar APBD melalui kombinasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Kata Kunci : Pengelolaan, air limbah domestik, Kota Praya NTB

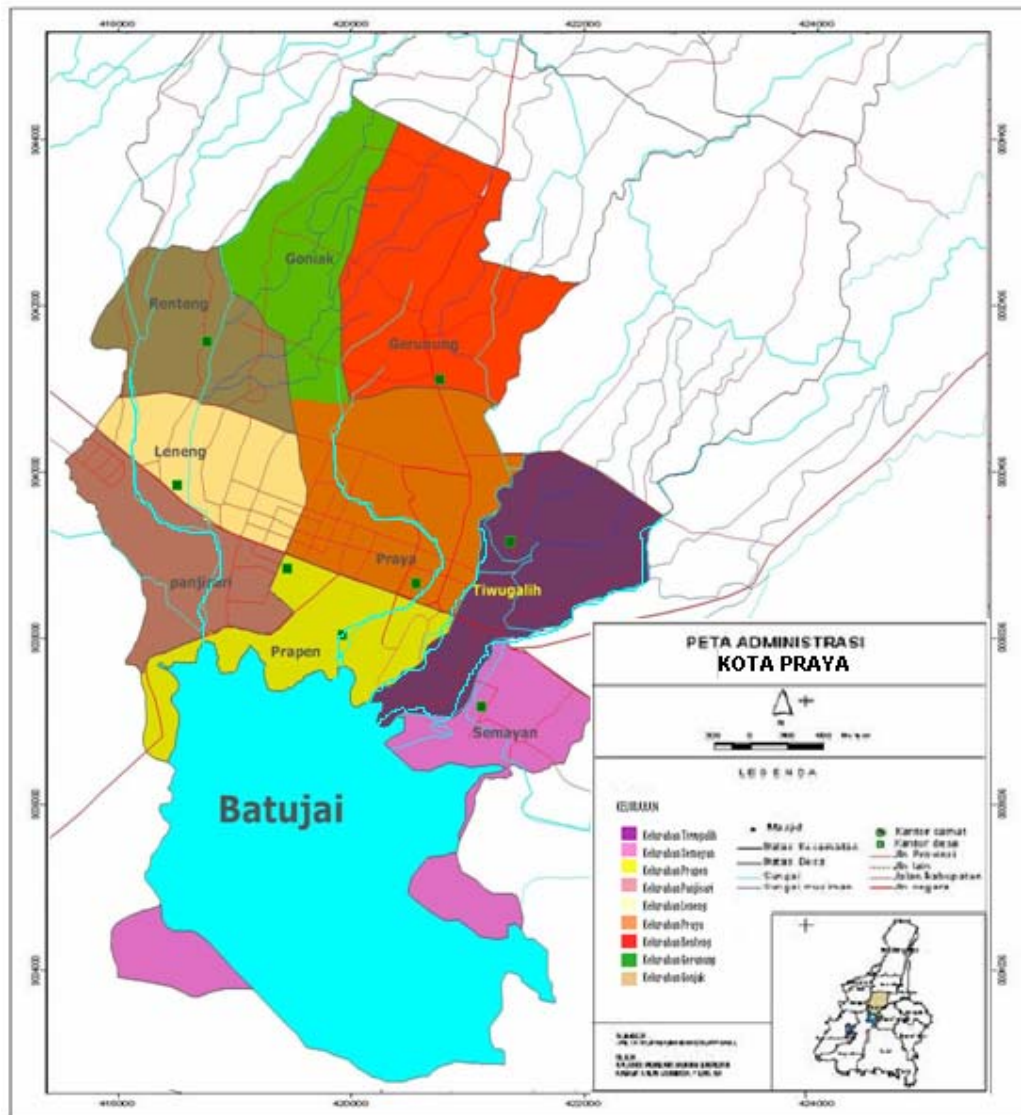
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Praya merupakan Ibu Kota Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berada 30 km sebelah timur Kota Mataram. Secara geografis Kota Praya terletak pada posisi 116°05' sampai 116°24' Bujur Timur dan 8°24' sampai 8°57' Lintang Selatan. Luas Kota Praya mencapai 31,12 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 57.389 jiwa (1.844 Jiwa/km²) yang tersebar di 9 kelurahan. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu Kota Praya masih tergolong kota kecil karena jumlah penduduknya antara 20.000 jiwa – 100.000 jiwa. Meskipun demikian permasalahan lingkungan sudah mulai nampak sebagaimana kota-kota sedang dan besar di Indonesia. Masalah sampah, limbah domestik, permukiman padat, dan lain-lain merupakan permasalahan klasik kota di mana-mana termasuk di Kota Praya.

Dari sekian unsur permasalahan yang tersebutkan di atas, maka unsur yang kompleks, nyata terkesampingkan dan tidak tersentuh secara managerial apalagi menjadi prioritas oleh banyak perhatian publik maupun pemerintah adalah unsur air limbah. Bukanlah berarti tidak ada sama sekali perhatian atau penanganan, namun pengelolaannya masih dapat teridentifikasi diselenggarakan dalam pencapaian yang tidak memadai (Bappenas, 2006)

Sebagai gambaran, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2006 dari 16.028 KK (57.389 jiwa) yang mendiami Kota Praya, sebanyak 8.411 KK (52,48%) sudah menggunakan jamban keluarga sebagai tempat Buang Air Besar (BAB), selebihnya menggunakan MCK umum, sungai dan yang lainnya. Sementara itu air limbah buangan dapur dan kamar mandi dari masing-masing rumah langsung dialirkan ke selokan atau sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Ini membuktikan bahwa pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya belum mendapatkan perhatian. Padahal jika dihitung volume limbah cair yang dihasilkan dari permukiman dapat mencapai volume yang sangat besar.



Gambar 1.1. Peta Kota Praya

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2006

Bambang Purwanto (2004) menyebutkan bahwa volume limbah cair yang dihasilkan oleh setiap orang mulai dari mandi, cuci dan lain-lain mencapai 100 liter per hari. Volume limbah domestik sangat bervariasi dan umumnya sangat berkaitan erat dengan standar hidup masyarakat (Djajaningrat dan Harsono, 1991). Lebih rinci lagi Metcalf dan Eddy dalam Sugiharto (2005 : 11)

menyebutkan rata-rata air limbah dari daerah permukiman sebagaimana tercermin dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Rata-rata Aliran Air Limbah dari Daerah Permukiman

No.	Sumber	Jumlah limbah per orang per hari (liter)	Rata-rata (litr/org/hari)
1	Apartemen	200 -300	260
2	Hotel, penghuni tetap	150 – 220	190
3	Tempat tinggal keluarga :		
	- Rumah pada umumnya	190 – 350	280
	- Rumah yang lebih baik	250 – 400	310
	- Rumah mewah	300 – 550	380
	- Rumah pondok	120 – 200	150

Sumber : Metcalf dan Eddy dalam Sugiharto (2005 : 11).

Jika dihitung berdasarkan volume limbah per orang per hari, sebagaimana data tersebut di atas, maka air buangan domestik yang dihasilkan oleh penduduk di permukiman Kota Praya, yang rata-rata perumahan biasa atau rumah pada umumnya adalah 57.389 jiwa (jumlah penduduk Kota Praya) x 100 liter/jiwa/hari maka air limbahnya bisa mencapai minimal 5.738.900 liter/hari.

Menurut Kositranata *et al.*, 1989; WHO, 1993 dalam Marganof (2007) konversi beban BOD, COD, total N dan total P perkapita perhari dari limbah cair yang tidak diolah masing-masing sebesar 53 gram, 101,6 gram, 22,7 gram dan 3,8 gram. Berdasarkan nilai konversi tersebut maka masyarakat Kota Praya yang tidak memiliki jamban keluarga, sebanyak 7.617 KK (27.271 jiwa), akan menghasilkan beban BOD 520,3 ton/tahun, COD 997,5 ton/tahun, total N 222,9 ton/tahun dan total P sebesar 37,3 ton/tahun. Oleh karena itu jika air limbah domestik tidak dikelola dengan baik maka setiap tahun beban pencemaran limbah organik terhadap sungai yang melintasi Kota Praya maupun Waduk Batujai akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pencemaran oleh air limbah domestik merupakan jumlah pencemar terbesar (85%) yang masuk ke badan air. Sedang di negara maju pencemar domestik merupakan 15% dari seluruh pencemar yang memasuki badan air (Suriawiria, 1996).

Menurut Sumirat (1996) air bekas cucian, air limbah kamar mandi dan air limbah dari dapur dikategorikan sebagai limbah yang mengandung sabun/deterjen dan mikroorganisme. Selain itu buangan ekskreta yaitu tinja dan urine manusia yang dipandang berbahaya karena dapat menjadi media penyebaran utama bagi penyakit bawaan air. Setiap orang umumnya menghasilkan 1,8 liter ekskreta tiap hari, terdiri dari 350 gram bahan padat kering termasuk 90 gram bahan organik, 20 gram nitrogen ditambah unsur hara lainnya terutama fosfor dan kalium

Besarnya jumlah pencemar domestik yang masuk ke badan air ditentukan oleh kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari pembuangan limbah serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah yang dihasilkannya.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas diperlukan suatu kajian pengelolaan limbah kota sehingga diharapkan nantinya air limbah domestik kota Praya dapat dikelola sebelum dibuang ke lingkungan. Kajian ini difokuskan pada sistem pengelolaan air limbah domestik baik dari aspek peraturan dan kebijakan, kelembagaan, persepsi dan partisipasi masyarakat, aspek pembiayaan dan aspek teknologi.

Kajian ini dilakukan di Kota Praya dengan pertimbangan bahwa wilayah ini yang merupakan penyumbang air limbah domestik terbesar yang masuk ke sungai. Hal lain yang mendasari lokasi penelitian ini adalah faktor letak Kota Praya yang berada di bagian hulu dari Waduk Batujai sehingga seluruh limbah yang dihasilkan dipastikan akan bermuara ke Waduk Batujai.

Bertitik tolak dari uraian tersebut maka diperlukan perhatian serius semua pihak terhadap pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari dapur dan kamar mandi yang ada di Kota Praya sehingga laju pencemaran badan air dapat diminimalisir yang pada gilirannya keberlanjutan pemanfaatan Waduk dapat tercapai.

Upaya pencegahan pencemaran terhadap Waduk Batujai ini sejalan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB bidang sosial dan lingkungan hidup yang dituangkan dalam RPJM Kabupaten Tahun 2006 – 2010 yaitu melaksanakan upaya-upaya yang mengarah pada perlindungan bagi sumber daya alam (termasuk Waduk Batujai) yang masih

dalam keadaan baik melalui pelibatan masyarakat serta peningkatan kapasitas dan peran aparatur dalam pengawasan.

Untuk menghindari terjadinya degradasi lingkungan serta penurunan kualitas yang semakin parah pada Waduk Batujai, maka diperlukan upaya pengelolaan limbah cair sebelum masuk ke badan air di samping melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pertumbuhan permukiman di bantaran sungai dan waduk.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka muncul suatu permasalahan bahwa Waduk Batujai yang berada di bagian hilir Kota Praya sangat rentan terhadap pencemaran oleh air limbah kota, terutama oleh limbah domestik yang berasal dari permukiman di bantaran sungai yang melintasi kota dan bermuara di Waduk Batujai. Untuk itu diperlukan suatu rencana pengelolaan limbah cair domestik kota yang partisipatif dan berkelanjutan. Atas dasar hal tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah ?
2. Langkah-langkah apa saja yang perlu diambil dalam pengelolaan air limbah domestik untuk wilayah Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah.
2. Menyusun langkah-langkah pengelolaan air limbah domestik di wilayah Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

Memberikan kajian perencanaan pengelolaan air limbah domestik Kota Praya dalam rangka meningkatkan pelayanan fasilitas sanitasi kepada masyarakat di Kota Praya.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi bagi masyarakat dalam rangka membuka wawasan tentang dampak air limbah dan bagaimana pengelolaannya.

3. Bagi Dunia Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perencanaan

Pengertian perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan belum terdapat batasan yang dapat diterima secara umum. Pengertian atau batasan perencanaan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada setiap jenis usaha manusia (Khairuddin, 1992 : 47).
2. Perencanaan adalah merupakan suatu upaya penyusunan program baik program yang sifatnya umum maupun yang spesifik, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Sa'id & Intan, 2001 : 44).
3. Perencanaan sebagai Analisis Kebijakan (Planning as Policy Analysis) yaitu, merupakan tradisi yang diilhami oleh logika-logika berpikir ilmu manajemen, administrasi publik, kebangkitan kembali ekonomi neoklasik, dan teknologi informasi yang disebut sibernetika

Perencanaan, meskipun mengandung pengertian masa depan, bukanlah hipotesis yang dibuat tanpa perhitungan. Hipotesis dalam perencanaan selalu didasarkan atas data-data dan perkiraan yang telah tercapai, dan juga memperhitungkan sumber daya yang ada dan akan dapat dihimpun. Dengan demikian, perencanaan berfungsi sebagai pedoman sekaligus ukuran untuk menentukan perencanaan berikutnya. Mosher (1965 : 191) menyatakan bahwa, seringkali perencanaan hanya meliputi kegiatan-kegiatan baru, atau alokasi keuangan untuk kegiatan-kegiatan lama, tanpa menilai kembali kualitasnya secara kritis. Acapkali lebih banyak sumbangan dapat diberikan kepada pembangunan dengan memperbaiki kualitas kegiatan yang sedang dalam pelaksanaan daripada memulai yang baru.

Perencanaan pada dasarnya adalah penetapan alternatif, yaitu menentukan bidang-bidang dan langkah-langkah perencanaan yang akan diambil dari berbagai kemungkinan bidang dan langkah yang ada. Bidang dan langkah yang diambil ini tentu saja dipandang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, sumber daya yang tersedia dan mempunyai resiko yang sekecil-kecilnya. Oleh sebab itu, dalam penentuannya timbul berbagai bentuk perencanaan yang merupakan alternatif-alternatif ditinjau dari berbagai sudut, seperti yang dijelaskan oleh Westra (1980) dalam Khairuddin (1992 : 48), antara lain :

1. Dari segi jangka waktu, perencanaan dapat dibedakan : (a) perencanaan jangka pendek (1 tahun), dan (b) perencanaan jangka panjang (lebih dari 1 tahun).
2. Dari segi luas lingkupnya, perencanaan dapat dibedakan : (a) perencanaan nasional (umumnya untuk mengejar keterbelakangan suatu bangsa dalam berbagai bidang), (b) perencanaan regional (untuk menggali potensi suatu wilayah dan mengembangkan kehidupan masyarakat wilayah itu), dan (c) perencanaan lokal, misalnya; perencanaan kota (untuk mengatur pertumbuhan kota, menertibkan penggunaan tempat dan memperindah corak kota) dan perencanaan desa (untuk menggali potensi suatu desa serta mengembangkan masyarakat desa tersebut).
3. Dari segi bidang kerja yang dicakup, dapat dikemukakan antara lain : industrialisasi, agraria (pertanahan), pendidikan, kesehatan, pertanian, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya.
4. Dari segi tata jenjang organisasi dan tingkat kedudukan menejer, perencanaan dapat dibedakan : (a) perencanaan haluan *policy planning*, (b) perencanaan program (program planning) dan (c) perencanaan langkah *operational planning*.

2.2. Perencanaan Pembangunan Partisipatif

2.2.1. Partisipasi

Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat dimana-mana, seolah-olah menjadi “label baru” yang

harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam perkembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peranserta, ikutserta, keterlibatan, atau proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat (Mitchell dkk., 2007).

Asngari (2001: 29) menyatakan bahwa penggalangan partisipasi itu dilandasi adanya pengertian bersama dan adanya pengertian tersebut karena di antara orang-orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam menggalang peran serta semua pihak itu diperlukan : (1) terciptanya suasana yang bebas atau demokratis, dan (2) terbinanya kebersamaan. Selain itu, Slamet (2003: 8) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Gaventa dan Valderama (1999) dalam Arsito (2004), mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu: 1) partisipasi politik (*Political Participation*), 2) partisipasi sosial (*Social Participation*) dan 3) partisipasi warga (*Citizen Participation/Citizenship*). Ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Partisipasi Politik (*political participation*) lebih berorientasi pada "mempengaruhi" dan "mendudukan wakil-wakil rakyat" dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
- b. Partisipasi Sosial (*social Participation*). Partisipasi ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai *beneficiary* atau pihak di luar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses

partisipasi sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.

- c. Partisipasi Warga (*citizen participation/citizenship*) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap ‘penerima derma’ atau ‘kaum tersisih’ menuju ke suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka”. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang lebih berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik oleh warga ketimbang menjadikan arena kebijakan publik sebagai wahana pembelajaran.

Menurut Alexander Abe (2001 : 114), perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya juga melibatkan masyarakat (baik langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan masyarakat, yang bila dirumuskan dengan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusannya akan berpihak pada masyarakat. Suatu perencanaan yang ingin melibatkan kepentingan masyarakat tentu saja harus berjuang untuk mengangkat yang tersimpan di bawah permukaan dan menggalinya secara seksama, serta merumuskannya dengan tepat, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan, artinya menggerakkan sebuah perencanaan partisipatif membutuhkan prakondisi maksud mentransformasikan kapasitas kesadaran dan keterampilan masyarakat, sehingga bisa keluar dari tradisi bisu dan menyembunyikan maksud di bawah permukaan. Selama hal ini tidak berlangsung, maka partisipasi hanya akan terlihat sebagai formalitas, sedangkan realitas sesungguhnya adalah hegemoni dan manipulasi.

Selanjutnya Alexander Abe (2001) menyebutkan bahwa melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan akan membawa 3 dampak penting yaitu sebagai berikut :

- (1) Terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki masyarakat.
- (2) Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik.
- (3) Meningkatkan kesadaran dan keterampilan masyarakat.

Perencanaan bersama masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat bisa langsung ambil bagian. Dalam hal ini ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dan dikembangkan (Alexander Abe, 2001) yaitu :

- a. Para peserta harus memiliki saling percaya, saling mengenal dan dan saling bisa bekerja sama agar dalam proses bisa berjalan dengan jujur dan terbuka dan tidak merupakan ajang siasat.
- b. Semua peserta bisa berbicara dan mengemukakan pandangannya secara fair dan bebas, oleh karena itu peserta tidak boleh ada yang lebih tinggi kedudukannya. Jikapun ada ada pemandu dalam proses, maka pemandu harus benar-benar berposisi sebagai “pemandu” dan bukan narasumber, yang pada akhirnya bisa membangun suasana asimetri.
- c. Perencanaan bersama masyarakat harus bermakna bahwa masyarakat peserta perumusan bisa menyepakati hasil yang diperoleh, baik saat itu maupun setelahnya. Harus dihindari praktek perang intelektual, dimana mereka yang berkelebihan informasi mengalahkan mereka yang miskin informasi secara tidak sehat. Kekalahan intelektual di forum tidak akan membuahkan penerimaan yang sehat. Karena itulah setiap tahap proses harus dilalui dengan berpegang pada prinsip demokrasi dan etika. Keputusan yang diambil harus merupakan keputusan bersama, dan bukan hasil rekayasa satu kelompok. Untuk bisa menghasilkan keputusan bersama, dibutuhkan pembahasan yang mendalam, sehingga masing-masing pihak benar-benar bisa paham sebelum keputusan diambil.
- d. Suatu keputusan yang baik tentu tidak boleh didasarkan pada dusta dan kebohongan. Prinsip ini hendak menekankan pentingnya kejujuran dalam penyampaian informasi, khususnya persoalan yang dihadapi. Hal yang dipentingkan dalam dalam soal ini adalah agar yang diungkapkan benar-benar

sesuatu yang menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bukan hasil rekayasa (cerita palsu).

- e. Berproses dengan berdasarkan kepada fakta, dengan sendirinya menuntut cara berfikir yang obyektif agar para peserta bisa berproses dengan menggunakan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ditetapkan dan tidak berpindah-pindah dalam menggunakan pijakan.
- f. Prinsip partisipasi hanya akan mungkin terwujud secara sehat, jika apa yang dibahas merupakan hal yang dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat. Kebutuhan ini mensyaratkan adanya orientasi khusus dari perencanaan yakni berfokus pada masalah-masalah masyarakat.

Arnstein (1969) dalam Mitchell (2007) menggambarkan partisipasi masyarakat adalah suatu pola bertingkat (*ladder patern*). Suatu tingkatan yang terdiri dari delapan tingkat dimana tingkatan paling bawah merupakan tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah, kemudian tingkat yang paling atas merupakan tingkat dimana partisipasi masyarakat sudah sangat besar dan kuat..

Tingkatan partisipasi masyarakat di atas bisa dijelaskan sebagai berikut.

a. Manipulasi (*Manipulation*)

Pada tingkat ini partisipasi masyarakat berada di tingkat yang sangat rendah. Bukan hanya tidak berdaya, akan tetapi pemegang kekuasaan memanipulasi partisipasi masyarakat melalui sebuah program untuk mendapatkan “persetujuan” dari masyarakat. Masyarakat sering ditempatkan sebagai komite atau badan penasehat dengan maksud sebagai “pembelajaran” atau untuk merekayasa dukungan mereka. Partisipasi masyarakat dijadikan kendaraan *public relation* oleh pemegang kekuasaan. Praktek pada tingkatan ini biasanya adalah program-program pembaharuan desa. Masyarakat diundang untuk terlibat dalam komite atau badan penasehat dan sub-sub komitenya. Pemegang kekuasaan memanipulasi fungsi komite dengan “pengumpulan informasi”, “hubungan masyarakat” dan “dukungan.” Dengan melibatkan masyarakat di dalam komite, pemegang kekuasaan mengklain bahwa program sangat dibutuhkan dan didukung. Pada kenyataannya, hal ini merupakan alasan utama kegagalan dari program-program pembaharuan pedesaan di berbagai daerah.

b. Terapi (*Therapy*)

Untuk tingkatan ini, kata “terapi” digunakan untuk merawat penyakit. Ketidakberdayaan adalah penyakit mental. Terapi dilakukan untuk menyembuhkan “penyakit” masyarakat. Pada kenyataannya, penyakit masyarakat terjadi sejak distribusi kekuasaan antara ras atau status ekonomi (kaya dan miskin) tidak pernah seimbang.

c. Pemberian Informasi (*Informing*)

Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan transisi antara tidak ada partisipasi dengan tokenism. Kita dapat melihat dua karakteristik yang bercampur. Pertama, pemberian informasi mengenai hak-hak, tanggung jawab, dan pilihan-pilihan masyarakat adalah langkah pertama menuju partisipasi masyarakat. Kedua, pemberian informasi ini terjadi hanya merupakan informasi satu arah (tentunya dari aparat pemerintah kepada masyarakat). Akan tetapi tidak ada umpan balik (*feedback*) dari masyarakat. Alat yang sering digunakan dalam komunikasi satu arah adalah media massa, pamflet, poster, dan respon untuk bertanya.

d. Konsultasi (*Consultation*)

Konsultasi dan mengundang pendapat-pendapat masyarakat merupakan langkah selanjutnya setelah pemberian informasi. Arnstein menyatakan bahwa langkah ini dapat menjadi langkah yang sah menuju tingkat partisipasi penuh. Namun, komunikasi dua arah ini sifatnya tetap buatan (*artificial*) karena tidak ada jaminan perhatian-perhatian masyarakat dan ide-ide akan dijadikan bahan pertimbangan. Metode yang biasanya digunakan pada konsultasi masyarakat adalah survai mengenai perilaku, pertemuan antar tetangga, dan dengar pendapat. Di sini partisipasi tetap menjadi sebuah ritual yang semu. Masyarakat pada umumnya hanya menerima gambaran statistik, dan partisipasi merupakan suatu penekanan pada berapa jumlah orang yang datang pada pertemuan, membawa pulang brosur-brosur, atau menjawab sebuah kuesioner.

e. Penentruman (*Placation*)

Strategi penentruman menempatkan sangat sedikit masyarakat pada badan-badan urusan masyarakat atau pada badan-badan pemerintah. Pada umumnya mayoritas masih dipegang oleh elit kekuasaan. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah dikalahkan dalam pemilihan atau ditipu. Dengan kata lain, mereka membiarkan masyarakat untuk memberikan saran-saran atau rencana tambahan, tetapi pemegang kekuasaan tetap berhak untuk menentukan legitimasi atau fisibilitas dari saran-saran tersebut. Ada dua tingkatan dimana masyarakat ditentramkan: (1) kualitas pada bantuan teknis yang mereka miliki dalam membicarakan prioritas-prioritas mereka; (2) tambahan dimana masyarakat diatur untuk menekan prioritas-prioritas tersebut.

f. Kemitraan (*Partnership*)

Pada tingkat kemitraan, partisipasi masyarakat memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Kekuatan tawar menawar pada tingkat ini adalah alat dari elit kekuasaan dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Kedua pemeran tersebut sepakat untuk membagi tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan melalui badan kerjasama, komite-komite perencanaan, dan mekanisme untuk memecahkan kebuntuan masalah. Beberapa kondisi untuk membuat kemitraan menjadi efektif adalah: (1) adanya sebuah dasar kekuatan yang terorganisir di dalam masyarakat di mana pemimpin-pemimpinnya akuntabel; (2) pada saat kelompok memiliki sumber daya keuangan untuk membayar pemimpinnya, diberikan honor yang masuk akan atas usaha-usaha mereka; (3) ketika kelompok memiliki sumber daya untuk menyewa dan mempekerjakan teknisi, pengacara, dan manajer (*community organizer*) mereka sendiri.

g. Pendelegasian Kekuasaan (*Delegated Power*)

Pada tingkat ini, masyarakat memegang kekuasaan yang signifikan untuk menentukan program-program pembangunan. Untuk memecahkan perbedaan-perbedaan, pemegang kekuasaan perlu untuk memulai proses tawar menawar dibandingkan dengan memberikan respon yang menekan.

h. Pengawasan Masyarakat (*Citizen Control*)

Pada tingkat tertinggi ini, partisipasi masyarakat berada di tingkat yang maksimum. Pengawasan masyarakat di setiap sektor meningkat. Masyarakat meminta dengan mudah tingkat kekuasaan (atau pengawasan) yang menjamin partisipan dan penduduk dapat menjalankan sebuah program atau suatu lembaga akan berkuasa penuh baik dalam aspek kebijakan maupun dan dimungkinkan untuk menegosiasikan kondisi pada saat di mana pihak luar bisa menggantikan mereka.

2.2.2 Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Ndraha (1990 : 104) menyatakan bahwa dalam menggerakkan perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, perencanaan partisipasi harus dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : (1) perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (*felt need*), (2) dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (*response*), dan (3) dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (*behavior*). Dalam perencanaan yang partisipatif (*participatory planning*), masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, karena walau bagaimanapun masyarakat merupakan stakeholder terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana.

Menurut Suzetta (2007), sebagai cerminan lebih lanjut dari demokratisasi dan partisipasi sebagai bagian dari *good governance* maka proses perencanaan pembangunan juga melalui proses partisipatif. Pemikiran perencanaan partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak dikenalkannya model perencanaan partisipatif, istilah “*stakeholders*” menjadi sangat meluas dan akhirnya dianggap sebagai idiom model ini.

Sementara itu Slamet (2003 : 11) menegaskan bahwa usaha pembangunan pedesaan melalui proses perencanaan partisipasi perlu didekati dengan berbagai cara yaitu : (1) penggalan potensi-potensi dapat dibangun oleh masyarakat

setempat, (2) pembinaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan, pengembangan, penyebaran sampai digunakannya teknologi itu oleh masyarakat pedesaan, (3) pembinaan organisasi usaha atau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan berbagai teknologi tepat guna untuk mencapai tujuan pembangunan, (4) pembinaan organisasi pembina/pendukung, yang menyambungkan usaha pembangunan yang dilakukan oleh individu-individu warga masyarakat pedesaan dengan lembaga lain atau dengan tingkat yang lebih tinggi (kota, kecamatan, kabupaten, propinsi, nasional), (5) pembinaan kebijakan pendukung, yaitu yang mencakup input, biaya kredit, pasaran, dan lain-lain yang memberi iklim yang serasi untuk pembangunan.

Adapun Cahyono (2006) menyatakan bahwa proses perencanaan pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat harus memperhatikan adanya kepentingan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam proses perencanaan pembangunan partisipasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain : (1) perencanaan program harus berdasarkan fakta dan kenyataan di masyarakat, (2) Program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi dan sosialnya, (3) Program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat, (4) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program (5) Pelibatan sejauh mungkin organisasi-organisasi yang ada (6) Program hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang, (7) Memberi kemudahan untuk evaluasi, (8) Program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat dan tenaga (KUWAT) yang tersedia.

2.3. Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan diartikan sebagai upaya sadar dan terpadu untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama. Dalam konteks lingkungan, pengelolaan lingkungan dapat diartikan sebagai upaya terpadu untuk mengembangkan strategi untuk menghadapi, menghidari, dan menyelesaikan penurunan kualitas lingkungan dan untuk mengorganisasikan program-program pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Soemarwoto (2004) mendefinisikan pengelolaan lingkungan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Sementara Mitchell (2007) mendefinisikan pengelolaan lingkungan sebagai suatu proses pengambilan keputusan bersama dimana solusi harus diambil berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam.

Kedua rumusan dari 2 (dua) ahli di atas tampaknya didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat sebagai satu kesatuan sosial mempunyai pemikiran dan tujuan yang sama tentang bagaimana memelihara atau memanfaatkan lingkungan.

Adapun Setiawan (2005) mengemukakan ada beberapa pendekatan pengelolaan lingkungan yaitu, sebagai berikut:

1. Pendekatan Ekologis
Dapat didefinisikan sebagai pengalokasian dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis, terutama hubungan-hubungan antar berbagai komponen dalam satu sistem lingkungan fisik dan biologis.
2. Pendekatan Ekonomis
Pendekatan ekonomis didasarkan atas pemikiran tentang kelangkaan sumber daya dan lingkungan sehingga menuntut para pengguna sumber daya dan lingkungan untuk melakukan pilihan-pilihan yang seksama dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal.
3. Pendekatan Teknologis
Pendekatan ini menekankan pada upaya-upaya teknologis yang memungkinkan proses produksi yang lebih efisien dengan hasil maksimal.
4. Pendekatan Sosio-Kultural
Pendekatan ini menekankan pada pentingnya memahami aspek-aspek sosial dan kultur masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan. Pandangan hidup, tata cara hidup, serta perilaku masyarakat tertentu akan sangat menentukan bentuk-bentuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya, sehingga pendekatan

ekonomis dan teknologis semata tidaklah cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan yang ada.

5. Pendekatan Sosio-Politis

Didasarkan atas pemikiran tentang beragamnya kelompok-kelompok kepentingan dalam pengelolaan lingkungan yang masing-masing mempunyai persepsi dan rencana yang berbeda terhadap lingkungan. Pendekatan ini menyadari pluralisme sistem sosial-politik sebagai komponen utama lingkungan serta implikasinya bagi proses-proses perubahan dan pengelolaan lingkungan.

Menurut Departemen Pekerjaan Umum 2007, aspek-aspek yang mempengaruhi pengelolaan air limbah domestik adalah sebagai berikut :

1. Demografi

Secara teknis dan kesehatan untuk kepadatan tertentu yaitu >50 orang/ha, penggunaan cubluk sudah mengakibatkan kontaminasi pada sumur-sumur tetangga. Di atas kepadatan 200 orang/ha penggunaan septik tank dengan bidang resapannya akan memberikan dampak kontaminasi bakteri *coli* dan pencemaran pada tanah dan air tanah.

2. Ekonomi

Aspek ekonomi juga merupakan hal yang akan menentukan dalam penentuan pemilihan sistem pengelolaan air limbah. Teknologi pengelolaan limbah yang digunakan untuk mencapai biaya efektif sangat tergantung pada tingkat obyektivitas yang harus dicapai. Penerapan teknologi pengelolaan air limbah tergantung dari standar efluen yang diperkenankan dan sampai tingkat mana kondisi lingkungan yang akan diperbaiki.

3. Sosial

Penduduk di suatu kawasan memiliki tingkat sosial ekonomi yang berbeda, sehingga akan sangat terkait dengan kemampuan membayar retribusi air limbah, dan hal ini akan sangat mempengaruhi dan berdampak secara teknis

terhadap konsep sanitasi yang akan diterapkan. Kondisi sosial ini akan menjadi kompleks karena dana yang mampu dialokasikan pemerintah terbatas. Kondisi sosial juga akan membedakan tingkat pencemaran yang dihasilkan. Dibandingkan dengan negara maju, umumnya tingkat BOD perkapita perhari di Indonesia tidak terlalu tinggi karena masih berkisar antara 30 gram sampai dengan 40 gram.

4. Lingkungan

- a. Iklim tropis sangat menolong pengolahan secara anaerob seperti septik tank, kolam anaerobik dan sebagainya.
- b. Intensitas hujan tropis yang tinggi akan memberikan *run off* yang sangat besar dibandingkan aliran air limbah, sehingga sistem *sewer* (saluran) terpisah antara air hujan dan air limbah pemukiman akan relatif lebih ekonomis dan sehat.
- c. Untuk pengelolaan air limbah pada kawasan-kawasan dengan effluen yang dibuang ke danau dan waduk, selain harus memperhatikan kadar BOD/COD dan SS juga harus mengendalikan kadar nitrogen dan fosfor yang akan memicu pertumbuhan algae biru dan gulma yang akan menutupi permukaan air danau.
- d. Jika tidak ada penetapan kuota pencemaran maka penetapan kualitas effluen hasil pengolahan limbah harus memperhitungkan kemampuan badan air penerima untuk "*natural purification*" bagi berlangsungnya kehidupan akuatik secara keseluruhan.

2.4 Karakteristik Limbah Kota

Kegiatan perumahan, industri dan berbagai kegiatan pelayanan, seperti di klinik, rumah sakit, pasar, penginapan dan sebagainya, yang umumnya terletak di dalam atau dekat wilayah perkotaan, akan menghasilkan berbagai limbah. Misalnya: limbah rumahtangga (*domestik*), limbah dari pabrik-pabrik susu dan makanan (tahu, tempe, bakso, dan lain-lain), pabrik tekstil, farmasi, pabrik kendaraan, dan masih banyak lagi, yang semuanya menimbulkan dampak terhadap kesehatan.

Pada umumnya seluruh limbah domestik dibuang langsung ke dalam badan sungai atau sembarang tempat yang tidak bertuan dan tanpa didahului pengolahan walaupun sederhana. Padahal limbah domestik mengandung campuran unsur-unsur yang sangat kompleks (Sudarmadji, 1995).

Kehadiran bahan pencemar di dalam badan air ada yang secara langsung dapat diketahui tanpa melakukan pemeriksaan laboratorium, seperti timbulnya busa, warna dan bau yang tidak sedap (Suriawiria, 1996).

Akibat kepadatan penduduk, seringkali ditemukan letak lobang-lobang pembuangan (WC) sangat berdekatan dengan sumber air (misal: sumur), yang tentu saja tak memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan bagi masyarakat penghuninya. Beberapa penelitian membuktikan banyaknya kandungan bakteri E-coli yang berasal dari kotoran manusia telah mencemari badan air (terutama permukaan) dan media tanah, penyebab pokok penyakit-penyakit *amoebiasis*.

Data lama (1997-1998) hasil penelitian Kantor Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan (KP2L), menunjukkan tingginya biaya kesehatan akibat air tercemar di DKI Jakarta, sudah mencapai sekitar US\$ 302 juta/tahun

2.5. Sanitasi di Wilayah Pemukiman

Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) dalam mengkaji masalah sanitasi berangkat pada kondisi saat ini dengan mengambil dari studi WSP yang masih relevan dan cukup jelas, dimana pelayanan sanitasi di Indonesia masih pada tingkatan *supply driven*. Apa yang diharapkan dengan mengacu pada visi dan misi maka pengembangan sanitasi menjadi *demand driven*, bagaimana untuk mencapainya serta bagaimana mempertahankannya agar terselenggara *demand responsive* dan apa yang telah diperoleh tersebut dapat dipertahankan terus secara kontinyu sehingga berkesinambungan (*sustainability*) (Bappenas, 2006).

Dari segi pendekatan ada pergeseran dari *supply driven* kepada *demand driven*. Misalnya dalam hal target, dulu fokusnya adalah agar masyarakat mempunyai jamban (yang merupakan *supply driven*). Sekarang ditekankan agar

masyarakat memiliki inisiatif sendiri dalam memilih sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik mereka (*demand driven*) (Bappenas, 2006).

2.5.1. Aspek hukum dan regulasi

Keberhasilan jasa sanitasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Aspek hukum dan peraturan diidentifikasi sebagai salah satu dari sejumlah aspek yang perlu didorong untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Untuk mencapai penatalaksanaan air limbah domestik perkotaan yang lebih baik diperlukan perhatian terhadap tiap-tiap bagian proses penatalaksanaannya:

- a. perencanaan dan pengembangan program,
- b. perancangan,
- c. pembangunan,
- d. operasional dan pemeliharaan, dan
- e. pemantauan.

Kerangka perundangan dan peraturan yang jelas harus dirancang untuk mendorong bagaimana proses penatalaksanaan ini dapat diatur dengan baik. Sejauh ini, tidak ada perundangan khusus yang mengatur penatalaksanaan limbah domestik kota karena sebagian besar peraturan ditetapkan untuk perlindungan lingkungan dan kesehatan lingkungan, bukan penatalaksanaan air limbah. Dengan cara lain, untuk mencapai perlindungan lingkungan dan kesehatan lingkungan, penatalaksanaan air limbah domestik menjadi bagian yang penting.

Dalam periode desentralisasi, perlindungan lingkungan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di tingkat propinsi dan kota/kabupaten (UU 32 tahun 2004, ayat 13 dan 14). UU 32 tahun 2004 mengatur tanggung jawab pemerintah daerah untuk perlindungan lingkungan dalam: merancang dan memantau pembangunan, perencanaan regional, pemberian fasilitas dan penatalaksanaan lingkungan.

Fungsi pemerintah daerah dipantau dan dibantu oleh pemerintah pusat seperti tertulis pada UU 32 tahun 2004 ayat 217. Pemerintah pusat harus memberikan norma, panduan dan standard (NSPM), pelatihan dan kursus. Secara nasional, fungsi pemerintah daerah dalam membantu dan memantau dikoordinasi oleh Kementerian Dalam Negeri (ayat 222, UU 32 tahun 2004). Di tingkat

kabupaten dan kota, fungsi ini dikoordinasi oleh gubernur dan di tingkat distrik dikoordinasi oleh walikota.

Undang-undang 7 tahun 2004 yang memaparkan mengenai penatalaksanaan kualitas air dan perlindungan polusi air sehubungan dengan bertahannya dan dipulihkannya sumber air. Ayat 24 (UU 7 tahun 2004) mengatur bahwa orang dan organisasi bisnis dilarang untuk melakukan aktifitas apapun yang dapat merusak sumber air.

Saat ini, kondisi fasilitas pengelolaan air limbah domestik di kota masih kurang. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tidak adanya institusi yang khusus menangani pengelolaan limbah
- b. Tidak ada peraturan spesifik/eksplisit dari pemerintah pusat untuk penatalaksanaan air limbah domestik sebagai acuan untuk pemerintah daerah
- c. Peran yang tidak jelas dalam mendampingi pemerintah daerah dalam mengembangkan penatalaksanaan air limbah domestik
- d. Sumber daya pemerintah daerah yang tidak memadai
- e. Kurangnya kesadaran akan sanitasi air limbah domestik di kalangan pemerintah daerah dan masyarakat
- f. Tidak adanya rencana penatalaksanaan air limbah domestik dan strategi di pemerintah daerah
- g. Peraturan pemerintah daerah yang tidak memadai untuk mendorong penatalaksanaan air limbah domestik
- h. Kurangnya dana.

2.5.2. Peran Para Pihak (stakeholders)

Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih, baik dalam perencanaan, pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 telah mengatur strategi dalam pengelolaan lingkungan, yakni kewajiban pemerintah melakukan koordinasi. Pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 ditegaskan bahwa :

- a. Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan

keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup (ayat 2)

- b. Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim (ayat 3)

Peran koordinasi pemerintah, akan menentukan keterpaduan pengelolaan lingkungan, termasuk dalam konteks pengelolaan limbah cair perkotaan. Sektor sanitasi tidak bisa ditangani oleh satu sektor saja, tetapi harus multi sektor, karena itu semua perlu bersinergi untuk menangani.

Ditingkat pusat yang berperan di samping Bappenas, Departemen Keuangan dan Depdagri, juga DepKes, Men.LH, Dep. Perindustrian, Dep.PU. Di tingkat daerah ada lembaga atau dinas di tingkat propinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Di samping itu juga LSM/NGO, swasta dan perorangan. Bila mereka bersinergi satu terhadap lainnya dengan tujuan akhir yang sama maka kemajuan penanganan sanitasi akan lebih signifikan. Belum teridentifikasi role sharing (pembagian peran) dan belum terorganisasikan secara jelas peran masing-masing lembaga (regulator, operator, provider, enabler, empowering body) dan siapa berkedudukan sebagai beneficiaries. Hal ini terkait dengan pemahaman pelayanan masyarakat (public service).

Melayani masyarakat menempatkan kedudukan masyarakat sebagai beneficiaries, akan tetapi apabila beneficiaries adalah pelaksana proyek sebagaimana sejumlah hasil pembangunan terdahulu yang tidak melibatkan masyarakat sejak awal perencanaannya, maka pengalaman ke'mubaziran' kerja/proyek dapat berlangsung kembali. Oleh karena itu, pembagian atau kejelasan peran sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih dan perbenturan kegiatan yang justru akan menurunkan kinerja masing-masing instansi. Siapa yang akan berperan sebagai regulator, siapa yang menjadi operator, siapa berperan sebagai pemberi dan penerima manfaat haruslah jelas adanya.

Meneg.LH sangat berperan dalam menyiapkan peraturan mengenai masalah lingkungan sebagai payung semua pembangunan dari kemungkinan

terjadinya pencemaran lingkungan. Khususnya untuk sanitasi, tentunya dalam hal pengaturan persyaratan semua air limbah yang boleh dibuang ke perairan, karena kemungkinan dampaknya terhadap sumber air baku air minum yang jumlahnya terbatas. Depkes sangat berperan sebagai regulator berkaitan dengan kualitas air yang dapat dikonsumsi, kemungkinan penyebaran penyakit melalui media air. Dep. Perindustrian terkait dengan industri rumah (*home industry*) yang limbahnya cairnya dapat mencemari badan air, seperti industri batik, pembuatan tahu dan lain-lain. Demikian pula dengan Departemen lainnya yang terkait dengan masalah sanitasi perannya cukup jelas. Namun ditingkat operasional di pemerintah daerah, peran lembaga dan dinas-dinas pada sub-sektor sanitasi sangat variatif dan terkesan tidak terkoordinasi dengan baik (Bappenas, 2006).

2.6. Pola Pengelolaan Air Limbah Domestik Berbasis Masyarakat

Pola pengelolaan air limbah domestik berbasis masyarakat berdasarkan hasil penelitian di Pulau Jawa adalah sebagai berikut (Kustiah, 2005) :

1. Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Berbasis Masyarakat
 Inisiatif awal : Pemerintah Dalam dan Luar Negeri, Lembaga Swasta (Yayasan, LSM), masyarakat (individu/motivator).
2. Kelembagaan Pengelola Air Limbah
 Lembaga Pengelola dapat dilaksanakan oleh masyarakat (mandiri), masyarakat di bawah yayasan, pengurus tingkat:Rt/RW dan desa dengan pengurusan berdasarkan kesepakatan masyarakat yang dilaksanakan dalam rembung warga. Bentuk-bentuk kelembagaan tergantung pada kondisi dan situasi kebutuhan yang ada di masyarakat. Struktur organisasi pengelola yang ada di masyarakat **sifatnya fungsional dan teknis operasional, bukan struktural**, walaupun bersatu dengan organisasi kepengurusan RT/RW dan kelurahan/desa.
3. Pola pembiayaan pengelolaan air limbah
 Biaya investasi untuk sarana sanitasi masih bergantung pada bantuan pihak donor (pemerintah dan swasta), kontribusi masyarakat masih rendah. Bentuk

kontribusi masyarakat: *in cash* dan *in kind* (berdasarkan kesepakatan). Bantuan biaya hanya sebatas pada pembangunan sarana. Biaya operasional dan pemeliharaan berasal dari pengguna sarana. Biaya pengoperasian dan perawatan sarana sanitasi diperlukan untuk keberlanjutan pengelolaan.

4. Pemilihan Teknologi Pengelolaan Air Limbah

Dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah di masyarakat dilakukan terhadap air limbah domestik. Jenis pengolahannya adalah penyatuan limbah dari sumber ke instalasi komunal dengan cara memasang sambungan perpipaan dari sumber (dari kamar mandi) ke instalasi pengolahan limbah. Sistem pengaliran dipilih secara gravitasi untuk menghemat biaya operasional, pemilihan jenis teknologi dan lokasi penempatan perlu diperhatikan.

5. Pola partisipasi masyarakat pengelolaan air limbah

- a. Pendekatan partisipasi pada proses perencanaan, konstruksi, dan operasi
- b. Media partisipasi melalui institusi formal lewat RT, dan melalui LSM serta perguruan tinggi.
- c. Partisipasi masyarakat sebagai konsumen dalam pengoperasian dan pemeliharaan, setiap masyarakat membantu menjaga keberadaan fasilitas disamping melaksanakan penggelontoran setiap satu minggu sekali disamping membayar iuran perawatan setiap bulan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya. Menurut Agus Salim, 2006, secara umum studi kasus dapat diartikan sebagai metode atau strategi penelitian dan sekaligus hasil suatu penelitian pada kasus tertentu. Studi kasus lebih dipahami sebagai pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya yang alamiah tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif karena didasarkan pada kondisi empirik yang ditemukan di lapangan yang menggambarkan suatu fenomena yang mempunyai keterkaitan dengan upaya peningkatan pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya. Menurut Sujarwo (2001:51) pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang berpola penggambaran apa yang ada di lapangan dan mengupayakan penggambaran data, terlepas apakah data itu kualitatif ataupun kuantitatif.

Dengan pendekatan ini peneliti diberikan kebebasan untuk menggambarkan dan menelaah kondisi dari obyek penelitian dari sudut pandang yang ada padanya. Tidak adanya batasan tertentu yang kaku membuat setiap fenomena yang ditemukan pada saat proses penelitian dapat dijabarkan sesuai dengan literatur pengembangan kawasan yang ada.

3.2 Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, aspek-aspek yang dikaji adalah

- a. Kelembagaan pemerintah beserta tupoksi dan kinerjanya yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik dan kelembagaan lokal yang memungkinkan menangani pengelolaan air limbah di masyarakat.
- b. Sumber dan potensi pembiayaan yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya

- c. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah termasuk persepsi, kebiasaan dan peran stakeholders dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- d. Peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya

3.3 Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data yaitu para informan yang terpilih untuk diwawancarai di lapangan. Data primer ini meliputi:

- a. Kelembagaan pengelola air limbah
- b. Partisipasi masyarakat
- c. Pembiayaan
- d. Penyelenggaraan

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari dinas atau instansi yang ada kaitannya dengan penelitian, seperti Dinas PU, Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Bappeda, dan Badan Pusat Statistik. Data sekunder tersebut antara lain:

- a. Peraturan dan kebijakan
- b. Batas-batas wilayah administratif;
- c. Keadaan Penduduk;
- d. Keadaan fisik sungai ;
- e. Dokumen mengenai kebijakan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.
- f. Teknologi pengelolaan air limbah domestik

3.4 Aspek yang Diamati

Aspek yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek peraturan dan kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya.

2. Aspek kelembagaan yaitu lembaga yang mengelola prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
3. Aspek partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
4. Aspek pembiayaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik
5. Aspek teknologi yaitu sistem yang sesuai diterapkan dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dibatasi pada data primer dan data sekunder. Menurut Sugiarto et.al (2001:6) data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, sedangkan data sekunder merupakan data primer yang diperoleh orang lain dan atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan/informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan berdasarkan pedoman wawancara yang ditetapkan. Karena wawancara adalah proses tanya jawab langsung, maka informasi atau data yang diperoleh dinilai tepat dan akurat untuk memberikan gambaran pada status obyek yang diteliti. Wawancara ini dilakukan terhadap masyarakat biasa, tokoh masyarakat, kepala lingkungan, LSM, aparat pemerintah kelurahan di 5 kelurahan, camat dan dinas instansi yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik yaitu Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL), Dinas Kesehatan, Bapeda, dan Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah. Jumlah informan tidak dibatasi tergantung perkembangan informasi yang didapat oleh peneliti dari wawancara yang dilakukan. Adapun jumlah informan yang telah diwawancarai keseluruhannya berjumlah 31 orang dengan rincian untuk masing-masing unsur

sesuai dengan yang tercantum dalam tabel 3.1. Selain wawancara dilakukan juga penyebaran kuesioner terhadap 109 KK (1% dari jumlah KK di daerah sampel penelitian) untuk memperkaya jawaban yang diperoleh melalui pedoman wawancara. Jumlah responden tersebut terdiri dari tokoh masyarakat, LSM, Aparat Kelurahan, Anggota PKK dan masyarakat biasa. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan alat bantu berupa alat perekam dan alat tulis menulis.

Tabel 3.1 Jumlah informan yang diwawancarai

No	Lokasi	Informan					Jumlah
		Tokoh Formal	Kaling/ Ketua RT	Tokoh Masyarakat	Masyarakat Biasa	LSM	
I	Kelurahan						
	Praya	2	1	1	2	-	6
	Prapen	1	2	1	2	1	7
	Semayan	1	-	1	1	-	3
	Tiwugalih	1	1	1	1	1	5
	Leneng	1	1	1	2	-	5
II	INSTANSI						
	Bapeda	1					1
	Dinas Kesehatan	1					1
	Dinas PU & Pertamana	1					1
	KPMLH	1					1
	Camat Praya	1					1
	Jumlah						31

Sedangkan untuk jumlah responden diambil sejumlah 1% dari total jumlah KK dari 5 (lima) kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Jumlah responden dari masing-masing kelurahan lokasi penelitian

Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah Responden
1. Leneng	1.793	18
2. Praya	2.319	23
3. Tiwu Galih	2.294	23
4. Semayan	1.368	14
5. Prapen	3.151	31
Jumlah	10.915	109

2. Observasi

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian. Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan, pencatatan secara sistematis tentang gejala-gejala yang terjadi secara langsung disaksikan dan dialami oleh peneliti dilapangan. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan observasi secara terbuka. Pengamatan secara terbuka diketahui oleh subjek, sedangkan sebaliknya pada subjek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan mereka menyadari bahwa ada orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka.

3. Penelaahan Dokumen

Penelaahan dokumen dilakukan sebagai salah satu teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini. Dokumen yang ditelaah adalah dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik. Data yang dikaji meliputi data statistik, peta, laporan, rencana, maupun kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Teknik ini berguna untuk mengumpulkan semua informasi dari literatur dan dokumen resmi yang dikeluarkan dinas/ badan yang berwenang (data sekunder), seperti Bappeda, Dinas Kimpraswil serta pihak lain yang terkait.

3.6 Populasi Penelitian

Dalam suatu penelitian, populasi yang dipilih mempunyai hubungan erat dengan masalah yang ditelaah. Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1989). Ini berarti populasi merupakan kumpulan individu/objek penelitian yang memiliki kualitas-kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan Berdasarkan kualitas dan ciri tersebut, populasi dapat dipahami sebagai sekelompok individu/obyek

pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakter dan mewakili populasi masyarakat dan instansi.

Dalam menentukan narasumber dari unsur tokoh masyarakat yang akan dijadikan responden/informan ditetapkan persyaratan sebagai berikut :

1. Dalam setiap rapat kelurahan calon narasumber tersebut selalu diundang dan dimintai pendapat sebelum memutuskan sebuah keputusan kelurahan
2. Pendapatnya didengar oleh masyarakat banyak
3. Memiliki wawasan dan kritis dalam menyikapi suatu permasalahan
4. Mampu berkomunikasi dengan baik.

Penentuan narasumber dari pihak pemerintah mengikuti disposisi pimpinan instansi/kantor dimana data dan informasi akan diambil. Pejabat yang ditunjuk pimpinan instansi merupakan pejabat yang memiliki tugas pokok yang mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan.

3.7 Penentuan Daerah Sampel

Penelitian dilakukan di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari 5 (lima) kelurahan dari sembilan kelurahan yang ada yaitu Kelurahan Prapen, Semayan, Praya, Tiwugalih dan Leneng. Pemilihan kelurahan ini didasarkan atas pertimbangan letak kelurahan yang berada di pusat kota dengan mengambil jumlah penduduk paling besar, dimana kelima kelurahan tersebut merupakan 5 kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dari 9 kelurahan yang ada. Adapun jumlah penduduk masing-masing kelurahan disajikan dalam tabel 4.2.

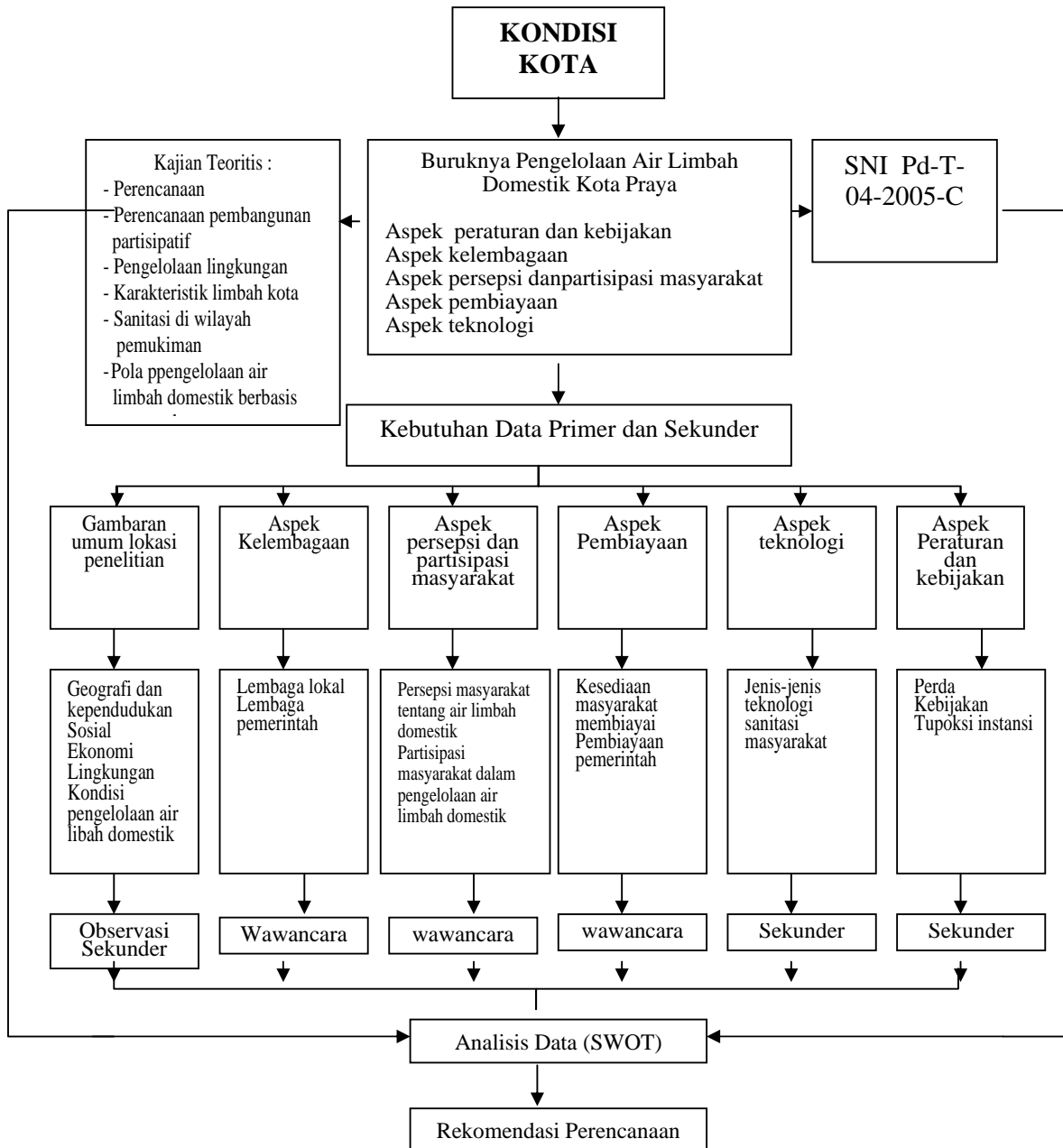
3.8 Teknik Analisis

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu teknik analisis yang melakukan pendekatan analisis dengan menggunakan sudut pandang peneliti sebagai alat analisis utama.

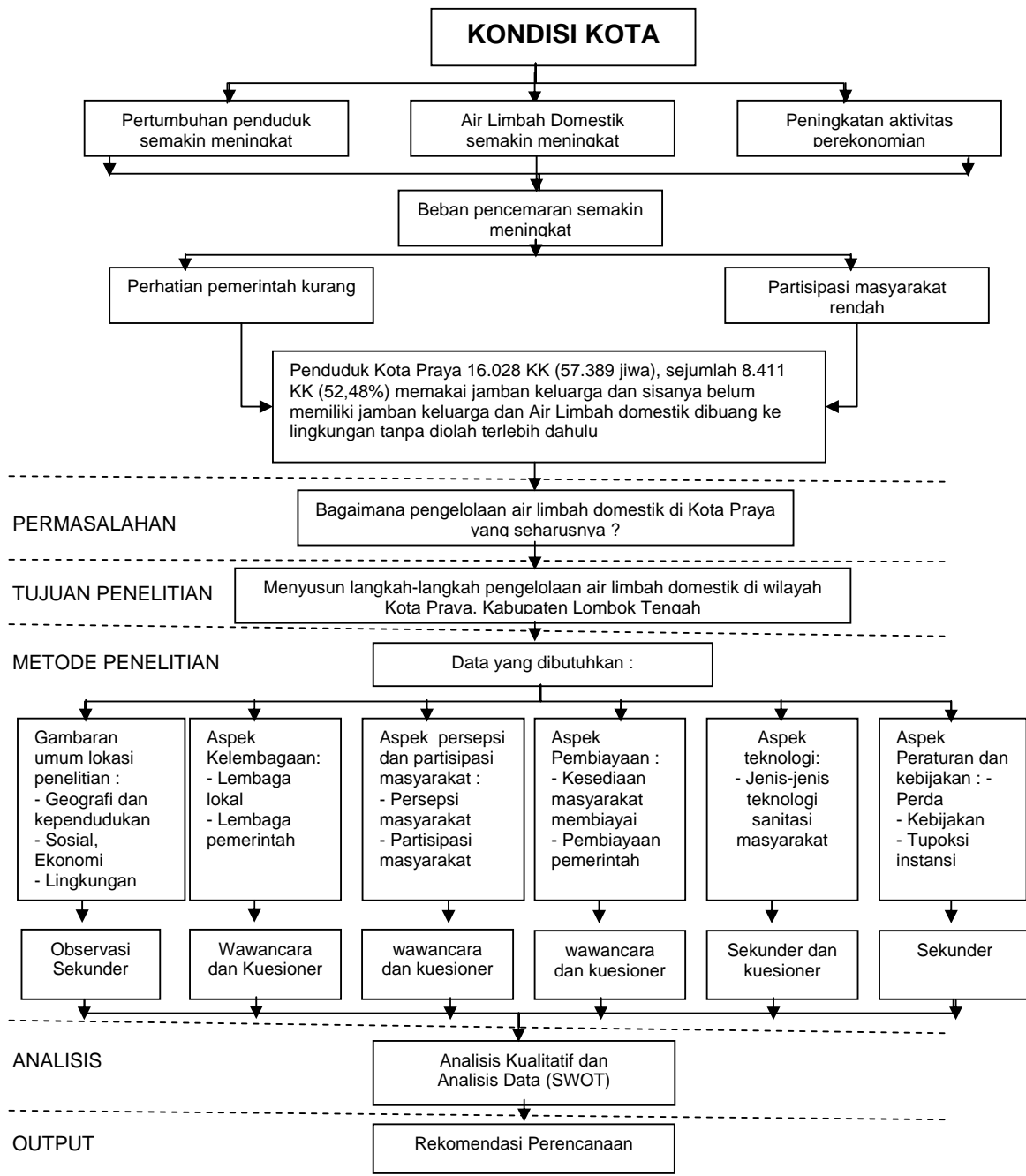
Data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber kemudian dianalisa dengan mempertimbangkan pendapat, pemikiran, persepsi dan interpretasi dari pihak-pihak yang berkompetensi dengan masalah penelitian.

Selain itu dalam rangka menentukan strategi dan kebijakan dalam penyusunan perencanaan pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya dilakukan juga analisis SWOT.

3.9. Kerangka Alur Penelitian



Gambar 3.1. Kerangka Alur Penelitian



Gambar 3.1. Kerangka Alur Penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Geografi dan Kependudukan

Kota Praya merupakan bagian dari Kecamatan Praya yang terletak di bagian Tengah dari wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Luas Kota Praya yang terdiri dari 9 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 3.112 ha atau sekitar 50,8 % dari luas Kecamatan Praya.

Kota Praya merupakan kecamatan ibukota Kabupaten Lombok Tengah sehingga Kota Praya menjadi pusat kegiatan perekonomian serta administrasi pemerintahan.

Batas-batas wilayah Kota Praya adalah sebagai berikut :

- ❑ Sebelah Utara : Desa Jago, Desa Mertak Tombok dan Desa Bunut Baik
- ❑ Sebelah Timur : Desa Gerantung Kecamatan Praya Tengah
- ❑ Sebelah Selatan : Waduk Batujai
- ❑ Sebelah Barat : Desa Puyung

Pada tahun 2006, jumlah penduduk Kota Praya tercatat sebanyak 57.385 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebagian besar atau 30.266 jiwa merupakan penduduk perempuan, sisanya atau sebanyak 27.119 jiwa merupakan penduduk laki-laki.

Dilihat dari sebaran penduduk per kelurahan, maka Kelurahan Prapen merupakan kelurahan yang memiliki penduduk terbesar yakni sebesar 19,98% dari total penduduk Kota Praya. Bila jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah diperoleh angka kepadatan penduduk. Pada tahun 2006 kepadatan penduduk Kota Praya sudah mencapai 1.844 jiwa per km² (18 orang/ha. Kepadatan tertinggi terjadi di Kelurahan Praya dengan angka mencapai 4.354 jiwa/km² (44 orang/ha), diikuti Kelurahan Prapen dan Kelurahan Tiwugalih masing-masing 2.888 jiwa/lm² (29 jiwa/ha) dan 2.679 jiwa/km² (27 jiwa/ha).

Masalah kepadatan penduduk merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi pengelolaan air limbah.

Menurut Departemen Pekerjaan Umum 2006, di perkotaan atau di perdesaan mempunyai kawasan-kawasan dalam bentuk klaster dengan kepadatan penduduk yang berbeda dan kondisi sosial yang berbeda. Kondisi ini mempengaruhi pola pengelolaan air limbah domestik. Secara teknis dan kesehatan untuk kepadatan tertentu yaitu > 50 orang/ha, penggunaan cubluk sudah menyebabkan kontaminasi pada sumur- sumur tetangga. Kepadatan penduduk 100 orang/ha memberikan dampak pencemaran cukup besar terhadap lingkungan. Di atas kepadatan 200 orang/ha penggunaan *septik tank* dengan bidang resapannya akan memberikan dampak kontaminasi bakteri coli dan pencemaran pada tanah dan air tanah. Kepadatan penduduk ini juga akan menentukan teknologi yang akan diterapkan dalam pengelolaan air limbah domestik.

Tabel 4.1 Luas Kelurahan dan Jumlah Penduduk di Kota Praya Tahun 2006

Desa/Kelurahan	Luas (ha)	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah jiwa	Kepadatan penduduk (jiwa/ha)
1. Kel. Panji Sari	180	974	1.334	1.556	2.890	16,06
2. Kel. Leneng	538	1.793	3.226	3.623	6.849	12,73
3. Kel. Renteng	403	1.366	1.763	2.101	3.864	9,59
4. Kel. Praya	241	2.319	5.193	5.301	10.494	43,54
5. Kel. Prapen	397	3.151	5.505	5.960	11.465	28,88
6. Kel. Tiwu Galih	321	2.294	3.997	4.601	8.598	26,79
7. Kel. Semayan	418	1.368	2.089	2.351	4.440	10,62
8. Kel. Gerunung	312	1.431	2.106	2.461	4.567	14,64
9. Kel. Gonjak	302	1.332	1.906	2.312	4.218	13,97
Jumlah	3.112	16.028	27.119	30.266	57.385	18,44

Sumber: Kecamatan Praya dalam Angka 2006

4.1.2. Sosial

a. Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga

Tingkat pendidikan Kepala Keluarga di Kota Praya hingga tahun 2006 masih didominasi oleh tingkat pendidikan mulai tidak tamat SD hingga tamat SD/SLTP. Jumlah kepala keluarga seluruhnya mencapai 16.028 KK dan dari

jumlah tersebut yang tidak tamat SD mencapai 4.743 KK atau 30%, yang tamat SD/SLTP mencapai 5.441 KK atau 34% dan Tamat SLTA ke atas berjumlah 5.844 KK atau 36%.

Tingkat pendidikan kepala keluarga akan berpengaruh pada pemahaman dan persepsi keluarga terhadap air limbah domestik beserta dampak dan pengelolannya. Semakin tinggi pendidikan maka pemahaman terhadap air limbah domestik semakin baik tidak hanya sebagai penyebab lingkungan kotor tetapi sebagai penyebab tercemarnya sumber daya air.

Tabel 4.2 Jumlah Keluarga Menurut Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga di Kota Praya Tahun 2006

Desa/Kelurahan	Tidak Tamat SD	Tamat SD/SLTP	Tamat SLTA ke atas	Jumlah
1. Kel. Panji Sari	353	355	266	974
2. Kel. Leneng	438	511	844	1.793
3. Kel. Renteng	642	530	194	1.366
4. Kel. Praya	421	513	1.385	2.319
5. Kel. Prapen	900	1.023	1.228	3.151
6. Kel. Tiwu Galih	641	661	992	2.294
7. Kel. Semayan	411	629	328	1.368
8. Kel. Gerunung	375	613	443	1.431
9. Kel. Gonjak	562	606	164	1.332
Jumlah	4.743	5.441	5.844	16.028

Sumber : Kecamatan Praya dalam Angka 2006

b. Kondisi Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan Kecamatan Praya Dalam Angka Tahun 2006, jumlah keluarga prasejahtera dan KS-1 alasan ekonomi di Kota Praya mencapai 9.366 keluarga atau 58%. Tingkat kesejahteraan keluarga ini juga dapat berdampak kepada kemampuan masyarakat membiayai pengelolaan air limbah domestik (Departemen PU, 2006).

4.1.3. Ekonomi

Sebagai ibukota kabupaten di Kota Praya, terdapat kegiatan ekonomi yang sangat beragam mulai dari pertanian sampai kegiatan jasa-jasa. Berdasarkan Kecamatan Praya Dalam Angka 2006, di Kota Praya dijumpai sebanyak 13.973

unit kegiatan usaha termasuk pertanian. Dari jumlah tersebut didominasi oleh kegiatan pertanian sejumlah 4.587 unit kegiatan diikuti oleh kegiatan perdagangan sejumlah 3.674 unit kegiatan, kegiatan jasa-jasa sebanyak 3.273 unit kegiatan, Kegiatan angkutan sejumlah 1.119 unit, kegiatan konstruksi 628 unit, kegiatan industri 188 unit dan kegiatan lembaga keuangan, listrik gas/air serta penggalian masing-masing sejumlah 121 unit, 89 unit dan 60 unit.

4.1.4. Lingkungan

1. Iklim

Seperti halnya dengan kecamatan-kecamatan lainnya, iklim di Kecamatan Praya, dimana Kota Praya merupakan bagian dari Kecamatan Praya, tergolong iklim tropis yang ditandai dengan musim kemarau yang cukup panjang. Musim hujan terjadi mulai sekitar bulan Nopember sampai dengan April/Mei dan curah hujan tertinggi bulan Pebruari/Desember dan terendah bulan Juni/Juli dengan rata-rata jumlah hari hujan 101 hari dan curah hujan 1.491 mm.

Keadaan iklim juga berpengaruh terhadap sistim pengelolaan air limbah domestik. Bappenas, 2006, menyatakan bahwa iklim tropis sangat menolong pengolahan secara anaerob seperti septik tank, kolam anaerobik dan sebagainya. Pengolahan anaerob merupakan suatu tahap yang penting dari seluruh rangkaian serial pengolahan limbah. Intensitas hujan tropis yang tinggi akan memberikan *run off* yang sangat besar dibanding air limbah, sehingga sistim *sewer* (saluran) terpisah antara air hujan dan air limbah permukiman akan relatif lebih ekonomis dan sehat.

2. Sumber Daya Air

Kota Praya berdampingan dengan Waduk Batujai yang berada dibagian hilirnya yang merupakan muara dari sungai-sungai yang melintasi Kota Praya. Jumlah sungai dan kali yang melintasi Kota Praya sebanyak 4 (empat) buah yaitu sebagai berikut :

- Sungai Leneng (lebar 10 meter)
- Kali Kampung Jawa (lebar 3 meter)

- Sungai Manhal (lebar 15 meter)
- Sungai Srigangga (lebar 15 meter)

Keberadaan sungai dan kali juga mempengaruhi sistim pengelolaan air limbah Kota Praya. Kecenderungan pembuangan limbah cair domestik oleh penduduk menjadi lebih tinggi sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih baik untuk menghindari pencemaran air sungai dan Waduk.

3. Kondisi Air Sungai yang Melintasi Kota Praya dan Waduk Batujai

Kualitas air sungai dan Waduk Batujai berdasarkan hasil uji laboratorium Tahun 2003 menunjukkan bahwa. Kandungan BOD₅ air sungai yang melintasi Kota Praya dan waduk yang berada di bagian hilir Kota Praya menunjukkan telah melebihi ambang batas air kelas IV berdasarkan PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air. Hal ini salah satunya disebabkan karena air limbah domestik Kota Praya yang dialirkan ke sungai baik langsung maupun tidak langsung (KPMLH, 2003).

Dibandingkan dengan kelas air pada PP 82 Tahun 2001 maka pada tabel tersebut terlihat kandungan TSS, baik pada musim kemarau maupun pada musim penghujan belum melebihi ambang batas air kelas I. Pada keempat sungai dan waduk, kecuali Sungai Leneng, kandungan TSS pada musim penghujan cenderung meningkat. Kandungan BOD₅ pada musim hujan juga cenderung meningkat dibandingkan pada musim kemarau, kecuali Sungai Surabaya/Manhal dan waduk, dan masing-masing sungai serta waduk menunjukkan telah melebihi ambang batas air kelas IV. Sedangkan kandungan COD untuk semua sungai pada musim kemarau telah melebihi ambang batas air kelas II sedangkan pada musim hujan, kandungan COD telah melebihi ambang batas air kelas I tetapi tidak melebihi ambang batas air kelas II.

Untuk parameter NO₃ sebagai N pada semua sungai dan waduk kandungannya masih jauh di bawah ambang batas air kelas I baik pada musim kemarau maupun pada musim penghujan kecuali Sungai Surabaya/Manhal pada musim hujan sudah melebihi ambang batas air kelas IV.

Selain parameter-parameter tersebut, populasi enceng gondok yang tumbuh di Waduk Batujai terutama di muara-muara sungai yang semakin padat dan subur juga dapat dijadikan indikator kondisi air. Populasi enceng gondok yang semakin tinggi merupakan indikator tingginya kandungan bahan organik dalam air.

Tabel 4.3 : Hasil Uji Laboratorium air Waduk Batujai dan Air Sungai yang Melintasi Kota Praya

No.	Parameter	Kelas air Baku Mutu PP 82 Tahun 2001				Sungai Leneng		Sungai Pengames/ Kampung Jawa		Sungai Surabaya/ Manhal		Sungai Srigangga		Waduk Batujai	
		I	II	III	IV	Kemarau	Hujan	Kemarau	Hujan	Kemarau	Hujan	Kemarau	Hujan	Kemarau	Hujan
1	BOD ₅	2	3	6	12	13.67	47.33	14.87	70.67	12.73	8.5	15	33.7	15,16	11,08
2	COD	10	25	50	100	38	12.67	49.33	20	31.33	21	37	22	47,40	32,06
3	NO ₃ sebagai N	10	10	20	20	0,49	0.8	0.40	1,27	0.13	25.93	0.14	3,67	0,89	2,28
4	NH ₃ – N	0,5	(-)	(-)	(-)	2,82	4,18	9,67	3,93	1,35	4,00	8,37	3,72	1,66	2,88
5	Besi	0,3	(-)	(-)	(-)	0,23	3,12	0,05	4,73	TTD	8,78	0,06	14,33	-	8,46
6	Mn	0,1	(-)	(-)	(-)	0,47	TTD	0,46	TTD	0,27	TTD	0,28	TTD	0,05	-
7	Klorida	600	(-)	(-)	(-)	26,87	22	35,05	20,84	23,95	22,58	33,88	35,32	35,40	21,38
8	Nitrit sebagai N	0,06	0,06	0,06	(-)	0,14	0,13	TTD	0,07	0,01	0,107	0,05	0,167	-	0,06
9	Kesadahan	(-)	(-)	(-)	(-)	93,33	57	111,33	60,67	101	55,33	110	56	99,20	46,60
10	D O	6	4	3	0	0	6,25		6,00		5,76		5,83	-	5,34

Sumber : Data Base Kualitas Lingkungan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2003

Kandungan bahan-bahan pencemar sebagaimana disebutkan diatas memiliki potensi semakin bertambah dengan semakin bertambahnya penduduk Kota Praya. Sebab semakin banyak penduduk maka jumlah limbah yang masuk ke dalam badan airpun akan semakin banyak baik yang berasal dari dapur, kamar mandi maupun air limbah cucian jika air limbah domestik tidak diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Air limbah ini dapat mencemari sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah.

Hasil penelitian Sudarmadji, Dosen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (Unair) menyebutkan bahwa, sekitar 40 persen bahan pencemar sungai berasal dari limbah domestik warga yang berdiam di kawasan sungai. Limbah itu berasal dari buangan dapur, kamar mandi, dan sampah (www.unair.ac.id diakses . tanggal 30 Mei 2008).



Gambar 4.1 : Pertumbuhan Eceng Gondok Waduk Batujai di Muara Sungai

4. Jenis Tanah

Jenis tanah di Kota Praya umumnya adalah Grumosol hingga Lempung berpasir dengan kedalaman air tanah antara 5 sampai dengan 12 meter. Departemen PU, 2006 menyatakan bahwa keadaan tanah dan tinggi muka air tanah juga dapat mempengaruhi sistem pengelolaan air limbah domestik. Air tanah dengan kedalaman > 3 meter dapat menggunakan cubluk (Bappenas, 2006).

4.2. Kondisi Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Praya

4.2.1. Kebiasaan Masyarakat Dalam Mengelola Limbah Cair Rumah Tangga

a. Pembuangan air limbah kamar mandi dan dapur yang dilakukan masyarakat saat ini dan alasan-alasannya

Ada beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat Kota Praya dalam membuang air limbah rumah tangganya yaitu sebagai berikut :

1. Membuang air limbah rumah tangga ke got/parit dekat rumahnya dengan atau tanpa melalui pipa
2. Membuang ke sungai dengan atau tanpa melalui pipa
3. Menampung air limbah rumah tangga ke dalam lubang yang dibuat dekat kamarmandi.
4. Memakai air limbah rumah tangga untuk menyiram jalan

Berikut petikan hasil wawancara dengan informan unsur masyarakat dari Kelurahan Praya :

"Kalau tidak seperti itu mau kita apakan. Kalau di campur dengan septiktank WC, tampungannya bisa cepat penuh, juga tidak ada larangan dan tidak ada pelayanan seperti sampah serta ini yang murah meriah".

Informan unsur tokoh masyarakat dari Kelurahan Praya memberikan pernyataan umum tentang pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya yang senada dengan pendapat masyarakat sebagai berikut :

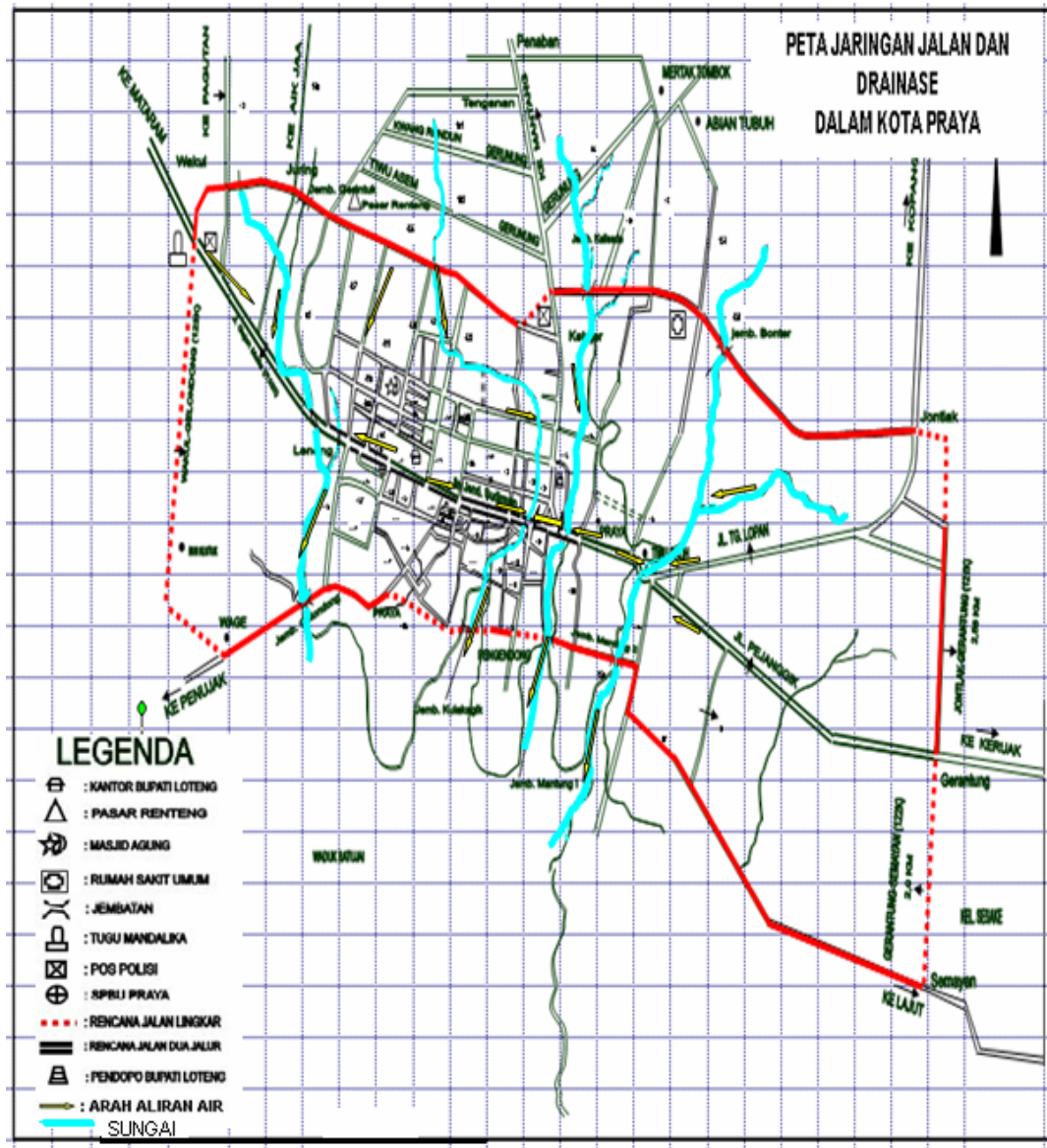
"Kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan "bebeleng" (air limbah domestik) adalah membuangnya ke lingkungannya. Ada yang membuang ke got, drainase dalam kampung atau ke sungai bagi yang dekat dengan sungai, sebab mau apa lagi kalau tidak seperti itu, seandainya ada pelayanan pengelolaan seperti sampah dan ada aturan yang melarang beserta dengan sanksi mungkin masyarakat tidak akan membuang air limbahnya ke got atau kali"

Hasil wawancara dengan sebuah LSM "PERAN" (Pemberdayaan Anak dan Perempuan) menyampaikan bahwa :

"Pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya masyarakat masih bersifat tradisional dari dulu hingga sekarang pengelolaannya berupa pembuangan air limbah ke lingkungan tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Padahal air limbah dapat mencemari perairan kita. Tidak seperti sampah yang sudah ada penanganan dari pemerintah meskipun masih jauh dari harapan, air limbah sama sekali saya melihat belum ada perhatian khusus untuk itu".

Sebagai gambaran sistem pengelolaan air limbah domestik oleh masyarakat dapat ditunjukkan dari hasil pengumpulan jawaban kuesioner. Dari 109 orang responden yang menjawab air limbahnya ditampung di bak/sumur/lubang penampungan/septiktank sebanyak 31,19% responden, disalurkan melalui pipa ke sungai sebesar 23,85%, dibuang ke got 47,71% responden, dipakai menyiram

pekarangan dan lainnya seperti dialirkan ke sawah masing-masing sebanyak 5,50% dan 11,93% responden.



Gambar 4.2. Peta jaringan jalan dan drainase Kota Praya

Sumber : Dinas Kimpraswil Kabupaten Lombok Tengah 2008

Adapun alasan mereka memperlakukan air limbah seperti disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya pelayanan pengelolaan air limbah rumah tangga seperti halnya sampah dengan jumlah responden yang menjawab 54,13%
2. Cara itu lebih mudah dengan jumlah responden 33,94%
3. Tidak membutuhkan biaya dengan jumlah responden 7,34%
4. Tidak ada larangan membuang air limbah ke got dengan jumlah responden yang menjawab 20,18%.

b. Kebiasaan Buang Air Besar (BAB)

Masyarakat di Kota Praya sebagian besar telah memanfaatkan WC sebagai tempat Buang Air Besar (BAB) namun demikian masih banyak juga masyarakat yang memanfaatkan kali/sungai sebagai tempat BAB. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dari Kelurahan Prapen memberikan gambaran secara umum kebiasaan BAB di Kota Praya :

”Umumnya masyarakat di Kel. Prapen dan di Kota Praya umumnya BAB di WC tetapi masih banyak juga yang BAB di kali terutama yang bertempat tinggal di pinggir sungai/kali”.

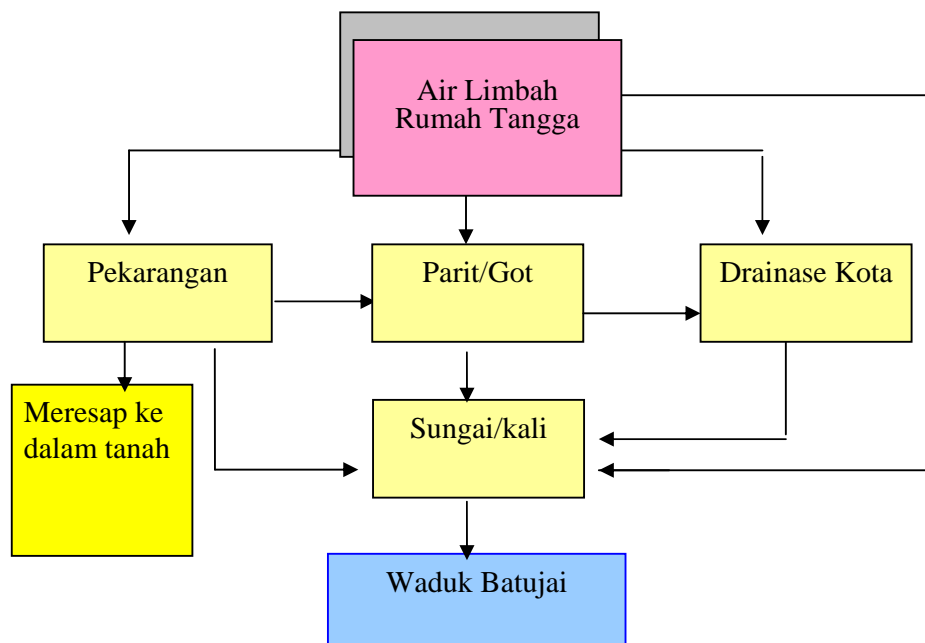
Dari hasil pengumpulan jawaban kuesioner juga diperoleh gambaran yang senada dengan hasil wawancara sebagai berikut : 72,48% responden telah menggunakan WC dan 11,01% memanfaatkan kali/sungai. Kondisi ini sesuai dengan jumlah jamban di Kota Praya yang tertera pada tabel 4.5. Masih banyaknya masyarakat yang BAB di kali/sungai karena cakupan jamban keluarga baru mencapai 52%.

4.2.2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Secara umum air limbah domestik di Kota Praya, yang berupa air limbah kamar mandi, cuci dan dapur dibuang langsung ke got, parit, selokan atau langsung ke sungai/kali atau sembarang tempat yang tidak bertuan dan tanpa didahului pengolahan walaupun sederhana. Air limbah rumah tangga yang dibuang ke parit atau got pinggir jalan pada akhirnya akan mengalir juga ke sungai/kali. Adapun skema pembuangan air limbah domestik di Kota Praya pada umumnya adalah sebagai berikut :

Selain itu sistem pengelolaan air limbah domestik yang ada saat ini berupa septiktank komunal sebanyak 2 unit yang dibangun akhir Tahun 2007 oleh Kantor

Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dengan sumber dana dari Dana Perimbangan Departemen Keuangan. Bangunan tersebut volumenya masing-masing 178 m³ dan 170 m³. Septiktank komunal tersebut rencananya dapat melayani masing-masing 100 KK. Namun demikian kedua septik tank komunal tersebut hingga Bulan April 2008 belum dioperasikan (lihat gambar 4.3)



Gambar 4.3. Skema Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik Kota Praya
Sumber : Hasil observasi 2008

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan di kedua lokasi septiktank komunal tersebut hal itu disebabkan karena beberapa hal :

1. Septiktank komunal tersebut belum tuntas pembangunannya dan lokasi penempatannya tidak representatif.
 - a. Septik tank yang ada di Serengat Selatan lokasinya memungkinkan air limbah dapat mengalir dengan baik karena berada di bagian bawah permukiman penduduk tetapi lokasi tersebut selalu digenangi air jika musim hujan. Selain itu hingga April 2008 penyambungan pipa utama yang masuk ke septiktank belum dilakukan.

- b. Septiktank yang berlokasi di Lingkungan Meteng aliran air limbah tidak lancar karena topografi lingkungan tersebut relatif datar sementara lokasi pembangunannya tidak memilih lokasi yang memungkinkan aliran limbah mengalir lancar.
2. Masyarakat belum dipersiapkan untuk mengoperasikan alat tersebut terkait dengan biaya pemeliharaan bangunan serta pengetahuan yang memadai dalam pengoperasian bangunan tersebut. Dari hasil wawancara dengan Sekertaris Kelurahan Prapen diperoleh informasi bahwa sejak pembangunan hingga selesainya pembangunan septiktank komunal tersebut belum pernah ada dari Kantor PMLH memberikan penyuluhan tentang operasionalisasi septiktank tersebut terkait dengan pemeliharaan dan perawatan yang dapat menjamin kelangsungan alat tersebut.

Hasil wawancara dengan seorang informan aparat Kelurahan Prapen menegaskan sebagai berikut :

”Perhatian pemerintah ada tetapi belum maksimal. Kami melihat lebih berorientasi pada proyek fisik sementara yang non fisik yang jauh lebih penting kurang diperhatikan. Sebagai contoh Septiktank komunal yang telah dibangun KPMLH setelah selesai tidak diikuti dengan pembinaan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak begitu antusias memiliki septiktank itu”

4.2.3. Sarana Prasarana Pengelolaan Air Limbah

Sarana dan prasarana air limbah yang ada di Kota Praya saat ini berupa septiktank komunal sebanyak 2 unit masing-masing memiliki volume 177 m³ yang dapat melayani masing-masing 100 KK. Septiktank komunal tersebut dibangun oleh Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah pada akhir Tahun 2007 dari dana perimbangan pusat. Namun demikian septiktank komunal tersebut hingga bulan April 2008 belum dioperasikan. Septik tank komunal tersebut dibangun di Kelurahan Prapen yaitu di Lingkungan Meteng 1 unit dan Lingkungan Serengat Selatan 1 unit.

Sarana dan prasarana lainnya berupa drainase perkotaan, got, kali dan sungai serta pekarangan rumah juga dimanfaatkan masyarakat Kota Praya membuang limbah rumah tangganya.



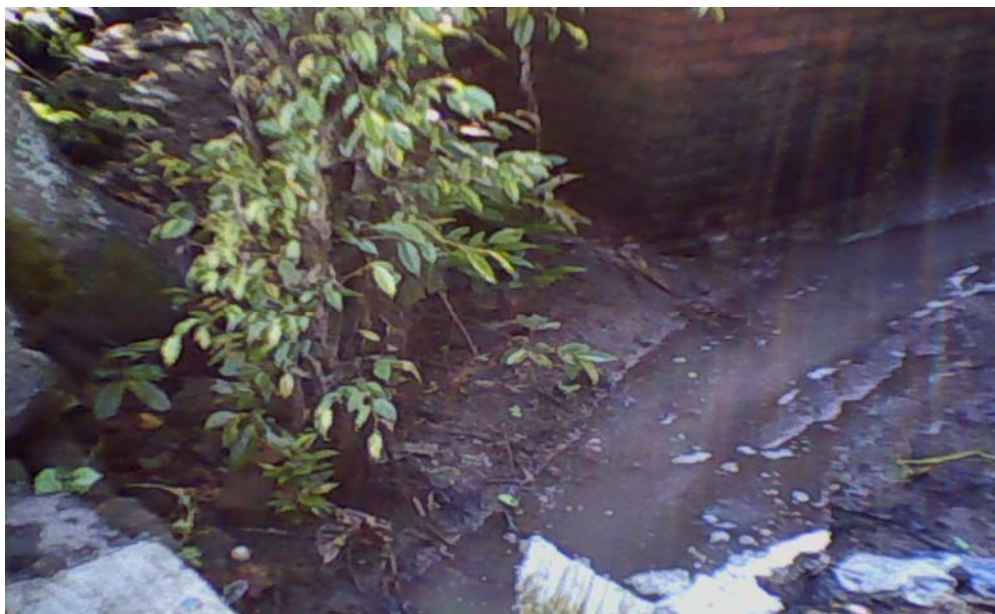
Gambar 4.4 : Septiktank Komunal dengan Kondisi Tergenang Air Waduk Batujai, Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah



Gambar 4.5 : Kali yang melintasi Kota Praya yang dijadikan sebagai prasarana pembuangan air limbah domestik



Gambar 4.6 : Prasarana Saluran Drainase Kota yang dipakai sebagai tempat Pembuangan Air Limbah Domestik di Kota Praya



Gambar 4.7. Pembuangan Air Limbah Domestik yang memanfaatkan pekarangan rumah



Gambar 4.8. Pembuangan Air Limbah Domestik yang memanfaatkan got

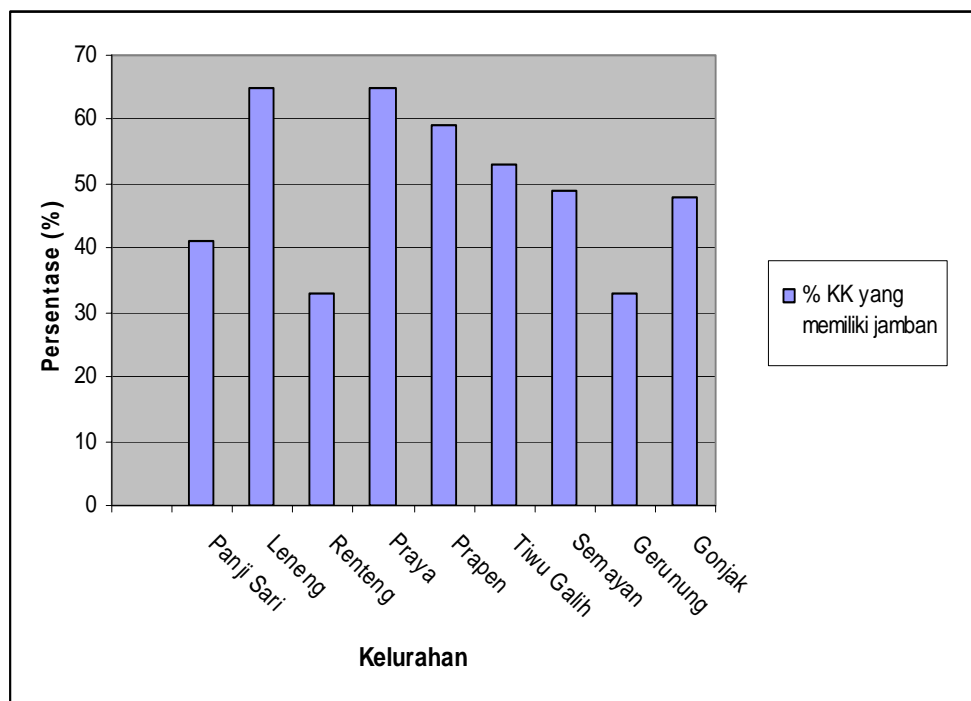
Dilihat dari kepemilikan jamban, berdasarkan data dari Puskesmas Praya Tahun 2007 disajikan dalam tabel 4.4. berikut ini :

Tabel 4.4. Jumlah Jamban Pribadi dan Jamban Umum di Kota Praya

Kelurahan	Jumlah KK	Jamban pribadi	Yang belum punya jamban (KK)	Jamban Umum	% KK yang memiliki jamban
1. Panji Sari	974	395	579	24	41
2. Leneng	1.793	1.162	631	16	65
3. Renteng	1.366	450	916	10	33
4. Praya	2.319	1.517	802	1	65
5. Prapen	3.151	1.874	1.277	6	59
6. Tiwu Galih	2.294	1.225	1.069	6	53
7. Semayan	1.368	671	697	-	49
8. Gerunung	1.431	472	959	-	33
9. Gonjak	1.332	645	687	6	48
Jumlah	16.028	8.411	7.617	69	52

Sumber Puskesmas Praya Tahun 2007

Dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase terendah kepemilikan jamban ada di Kelurahan Renteng dan Gerunung masing-masing baru mencapai 33% sedangkan persentase terbesar ada di Kelurahan Praya dan Leneng masing-masing mencapai 65%. Secara keseluruhan persentase KK yang memiliki jamban pribadi di Kota Praya mencapai 52% KK.

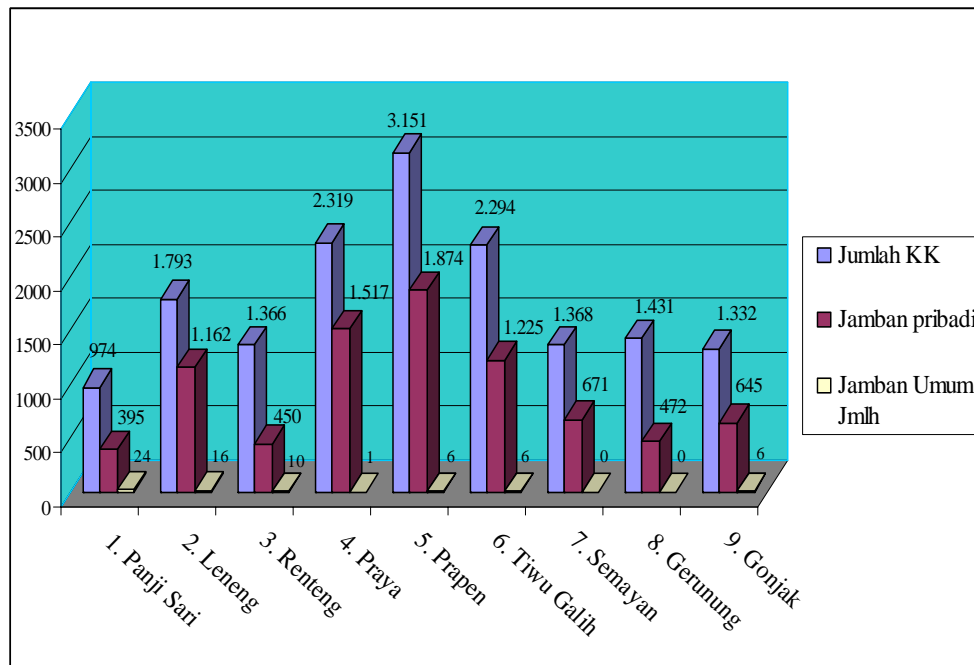


Gambar 4.9 Persentase KK yang memiliki jamban pribadi

Sedangkan jumlah jamban umum di Kota Praya hanya 69 buah. Kalau dilihat dari jumlah KK yang belum memiliki jamban pribadi yang mencapai 7.617 KK (48%) maka dapat dipastikan jamban umum tidak memadai yaitu 1 : 110 KK. Perbandingan ini menunjukkan bahwa potensi pembuangan tinja ke sungai oleh penduduk cukup besar, karena banyaknya penduduk yang belum memiliki jamban keluarga sehingga memanfaatkan kali dan sungai sebagai tempat BAB.

Menurut Profil Program Lingkungan Sehat Tahun 2007 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, cakupan penggunaan jamban keluarga

tahun 2007 masih jauh dari target yaitu 70% hingga tahun 2010 sebagaimana ditunjukkan grafik 4.5 berikut :



Gambar 4.10. Perbandingan Jumlah KK dengan Jumlah Jamban Pribadi dan Jamban Umum (2007)

Dari grafik terlihat bahwa Kelurahan Prapen merupakan kelurahan yang memiliki jumlah KK terbesar yang tidak memiliki jamban pribadi diikuti Kelurahan Tiwugalih dan Renteng.

4.2.4. Ketersediaan Sumberdaya Pengelolaan Air Limbah

Dari hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara dengan pihak pemerintah, maka terkait ketersediaan sumber daya dalam pengelolaan air limbah domestik terungkap beberapa pernyataan sebagai berikut :

1. Camat Praya

“Menyangkut ketersediaan lahan saya kira Kecamatan Praya belum begitu padat hanya beberapa titik saja yang memiliki penduduk padat”

2. Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup :

“Ketersediaan dana saya kira bukan masalah karena banyak sumber yang menjadi peluang yang bisa dipakai untuk membangun prasarana air limbah domestik. Yang menjadi permasalahan bagi KPMLH adalah kelembagaan KPMLH yang masih eselon III menjadi hambatan kami sementara kami mengemban tugas yang bersifat koordinatif”

3. Dinas Kimpraswil :

”Terus terang kami merasa kekurangan masalah dana dan kualitas SDM dalam pengelolaan air limbah domestik. Dana yang ada sebagian besar terserap untuk membangun infrastruktur jalan dan pengairan. Terkait kualitas SDM khusus menyangkut pengelolaan air limbah domestik masih sangat kurang karena itu kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan pelatihan tentang pengelolaan air limbah domestik oleh.”

4. Bapeda :

”Yang menjadi persoalan dalam hal pengelolaan air limbah domestik ini adalah belum dilibatkannya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik secara optimal sehingga banyak hasil proyek terbengkalai karena masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan” .

4.2.5. Sumber Air Bersih Yang Digunakan Masyarakat

Rata-rata masyarakat Kota Praya menggunakan sumber air bersih bersumber dari PDAM dan sumur gali, bahkan PDAM dan sumur gali sekaligus, tetapi ada juga sebagian kecil yang menggunakan air sungai dan mata air. Hasil wawancara dapat disajikan dalam petikan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dari Kelurahan Prapen sebagai berikut :

”Masyarakat kelurahan Prapen khususnya dan masyarakat Kota praya umumnya mendapatkan air bersih ada yang dari sumur gali, PDAM bahkan ada yang masih menggunakan sungai atau waduk”.

Berdasarkan Data Kecamatan Praya Dalam Angka Tahun 2006 diperoleh data sumber air bersih utama di Kota Praya sebagaimana tertera pada tabel 4.6. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah saluran PDAM lebih banyak dari jumlah sumur gali. Total keseluruhan prasarana air bersih (PDAM dan Sumur Gali) mencapai 11.780 buah. Jika dibandingkan dengan jumlah KK di Kota Praya sejumlah 16.028 KK maka cakupan air bersih di Kota Praya mencapai 73,50%.

Data sumber air bersih juga merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan sistem pengolahan air limbah domestik yang akan diterapkan di suatu daerah.

Tabel 4.5 Jumlah Saluran PDAM dan Sumur Gali di Kota Praya

Kelurahan	Jumlah KK	Saluran PDAM (buah)	Sumur gali (buah)	Jumlah sarana air bersih (buah)
1. Kel. Panji Sari	974	409	433	842
2. Kel. Leneng	1.793	1.658	258	1916
3. Kel. Renteng	1.366	49	550	599
4. Kel. Praya	2.319	1.768	217	1985
5. Kel. Prapen	3.151	1.417	1.309	2726
6. Kel. Tiwu Galih	2.294	1.310	933	2243
7. Kel. Semayan	1.368	213	284	497
8. Kel. Gerunung	1.431	215	378	593
9. Kel. Gonjak	1.332	47	332	379
Jumlah	16.028	7.086	4.694	11.780

Sumber : Kecamatan dalam angka 2006

4.2.6. Keberadaan Lembaga-Lembaga Lokal

Kelembagaan lokal selain RT/RW yang ada di Kota Praya, terdapat juga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Pengajian, Kelompok Arisan, Remaja Masjid (Remas) dan Karang Taruna. Kelompok ini memiliki potensi membangun masyarakat terutama dalam pengelolaan air limbah domestik. Dari beberapa lembaga lokal yang ada tersebut lembaga yang lebih dipercayai oleh masyarakat untuk mengurus pengelolaan air limbah di lingkungannya adalah ketua RT. Beberapa alasan masyarakat memilih lembaga lokal yang akan mengurus pengelolaan air limbah domestik di lingkungannya adalah :

- Dekat dengan masyarakat sehingga tahu persis permasalahan masyarakat
- Memiliki kejujuran dan komitmen membangun masyarakat
- Memiliki tujuan yang jelas

Beberapa petikan hasil wawancara dengan informan unsur masyarakat dari Kelurahan Praya, Prapen dan Leneng adalah sebagai berikut :

1. *Kinerja pak RT selama ini baik, dia mengurus semua kebutuhan warga dan yang penting adalah karena dia tahu persis warganya dan jujur*
2. *Ketua RT masih merupakan pilihan terbaik dari masyarakat karena dia merupakan lembaga yang terdekat dengan masyarakat*
3. *Siapun orangnya asal jujur dan memiliki tujuan yang jelas, bisa RT, Remaja Masjid atau karang taruna*

Dari hasil pengumpulan jawaban kuesioner diperoleh gambaran bahwa jumlah responden yang lebih mempercayai Ketua RT untuk memegang amanat kepengurusan pengelolaan air limbah domestik di lingkungannya sebesar 69,23%, sedangkan kepala lingkungan, remaja masjid atau yang lainnya sebesar 23,08%.

4.2.7. Kelembagaan dan Kebijakan

Berdasarkan hasil kajian dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Rincian Bagian Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonomi maka terdapat 4 instansi yang berperan dan terkait langsung dengan pengelolaan air limbah domestik. Keempat instansi tersebut adalah :

- a. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang salah satu tupoksinya adalah menyediakan sarana dan prasarana, pengaturan dan pengelolaan air bersih, drainase dan penggelontoran kota, sanitasi, pertamanan, fasilitas umum dan pasar. Tupoksi ini melekat pada Subdin Permukiman dan Tata Kota.
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah yang salah satu fungsinya merencanakan dan melaksanakan pembinaan kesehatan lingkungan permukiman, tempat-tempat umum, industri, institusi pendidikan dan perkantoran. Tupoksi ini melekat pada Subdin Penyuluhan dan Kesehatan Lingkungan.
- c. Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah yang salah satu tupoksinya adalah melakukan pemantauan dan pengawasan

terhadap pencemaran lingkungan termasuk pencemaran air di Kabupaten Lombok Tengah umumnya dan wilayah perkotaan khususnya.

- d. Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Lombok Tengah yang memiliki tupoksi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah termasuk perencanaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang salah satu tupoksinya adalah perencanaan pembangunan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan).

Dalam upaya pengelolaan air limbah domestik aspek peraturan perundang-undangan merupakan aspek yang penting sebagai acuan normatif dalam pengelolaan air limbah domestik. Terkait dengan regulasi yang secara khusus mengatur pengelolaan air limbah domestik, ditingkat nasional belum ada, namun ada beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan (Departemen PU, 2006) yaitu :

1. Undang-undang Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004 pasal 21 ayat (2) butir d yang mengisyaratkan akan pentingnya pengaturan sarana dan prasarana sanitasi (air limbah dan persampahan) dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, serta pasal 40 ayat (6) menyatakan bahwa pengaturan pengembangan sistem air minum diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 22 mengisyaratkan akan pentingnya kesehatan lingkungan melalui antara lain penanganan limbah padat dan cair.
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 6 dan pasal 16 menyiratkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta ditegaskan bahwa setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan atau kegiatan.
4. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan pasal 4 butir b disebutkan bahwa penataan perumahan dan permukiman bertujuan

untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat , aman, serasi dan teratur.

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Dalam Kepmen LH ini disebutkan bahwa air limbah domestik maksimum memiliki pH - 6 – 9, mengandung BOD 100 mg/l, TSS 100 mg/l dan Minyak dan Lemak 10 mg/l.

Di tingkat daerah Kabupaten Lombok Tengah hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan air limbah rumah tangga. Padahal menurut *Indonesian Sanitation Sector Development Program* (ISSDP Bappenas, 2006) keberhasilan jasa sanitasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Aspek hukum dan peraturan diidentifikasi sebagai salah satu dari sejumlah aspek yang perlu didorong untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. Untuk mencapai penatalaksanaan air limbah domestik perkotaan yang lebih baik diperlukan perhatian terhadap tiap-tiap bagian proses penatalaksanaannya: (1) perencanaan dan pengembangan program, (2) perancangan, (3) pembangunan, (4) operasional dan pemeliharaan, dan (5) pemantauan.

Dari hasil wawancara mendalam dengan Kepala Kantor PMLH Kabupaten Lombok Tengah diperoleh informasi sebagai berikut :

”Peraturan yang khusus terkait dengan pengelolaan air limbah domestik belum ada karena belum disusun. Hal ini disebabkan karena penyusunan sebuah perda membutuhkan waktu yang panjang dan yang menjadi bahan pertimbangan legislatif apakah perda itu bisa mendatangkan PAD atau tidak. Jika tidak bisa mendatangkan PAD maka akan mengalami kesulitan dalam penerbitannya”.

Demikian juga Dinas Kimpraswil dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah semuanya tidak memiliki peraturan perundangan daerah yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik.

Sementara itu kebijakan satu-satunya yang mulai digagas Bapeda yaitu penyusunan Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Renstra AMPL) yang telah rampung disusun akhir Tahun 2007 dan rencananya akan

disahkan Tahun 2008 dengan Peraturan Bupati. Berikut pernyataan Kabid Perencanaan Pembangunan II Bapeda Kabupaten Lombok Tengah :

”Kebijakan di bidang sanitasi sudah ada yaitu berbentuk rencana strategis AMPL tetapi masih berbentuk draft yang rencananya akan disahkan tahun 2008 melalui Peraturan Bupati dimana konsep perbup dimaksud sudah jadi. Adapun isinya lebih kepada pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan. Pengelolaan air limbah domestik masih terfokus pada pelayanan sanitasi khususnya jamban keluarga” .

Hingga saat ini Kabupaten Lombok Tengah, melalui instansi terkait, memang telah melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan penyehatan lingkungan permukiman setiap tahun namun pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terkoordinasi dengan baik. Sebagai contoh, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa pembangunan septiktank komunal yang seharusnya merupakan tupoksi Dinas Kimpraswil dilaksanakan juga oleh Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup. Disini terlihat bahwa telah terjadi tumpang tindih kegiatan antar instansi.

Program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kimpraswil
 - a. Program Pengembangan Perumahan dengan salah satu kegiatannya adalah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
 - b. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan salah satu kegiatannya adalah Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Berbasis Masyarakat
2. Dinas Kesehatan
 - a. Program Lingkungan Sehat, dengan salah satu kegiatannya meningkatkan mutu lingkungan perumahan dan permukiman
 - b. Program Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat dengan salah satu kegiatannya meningkatkan kepedulian terhadap perilaku bersih dan sehat
3. Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup
 - a. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan beberapa kegiatannya adalah Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura dan Penyusunan Kebijakan Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

- b. Program : Peningkatan Pengendalian Polusi dengan kegiatan Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi
- c. Program : Peningkatan Kualitas dan akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan.

4.2.8. Persepsi Masyarakat

Dalam rangka menyusun perencanaan pengelolaan terhadap air limbah domestik maka persepsi masyarakat terhadap air limbah perlu diketahui sebagai bahan masukan terhadap rencana pengelolaan. Dari persepsi masyarakat akan tergambar tingkat pengetahuan, keinginan dan harapan masyarakat terhadap pengelolaan air limbah. Oleh karena itu dengan mengetahui persepsi masyarakat akan menentukan langkah-langkah yang dapat diambil dalam sebuah perencanaan.

a. Kesan Masyarakat Terhadap Air Limbah Domestik Yang Terbuang Sembarangan

Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa umumnya masyarakat merasa jijik dan terganggu sekaligus prihatin dengan keberadaan air limbah domestik yang terbuang sembarangan. Beberapa informan bahkan menyatakan sangat terganggu dengan air limbah domestik yang mengotori lingkungannya. Berikut petikan hasil wawancara dengan informan unsur masyarakat dari masyarakat Kelurahan Praya :

"Saya terganggu apalagi kalau sedang mampet. Terkait dengan dampaknya terhadap sungai dan waduk saya sering berseloroh dengan teman-teman yang kebetulan pelanggan PDAM yang memanfaatkan air waduk, saya bilang "kalian itu jangan banyak tingkah dengan orang Praya sebab kalian mandi dan minum dari kotoran orang Praya"

Pernyataan senada juga terungkap dari informan unsur masyarakat dari Kelurahan Tiwugalih sebagai berikut :

"Kalau di sekitar rumah saya tidak merasa terganggu, karena langsung mengalir ke kali. Terkait dengan dampaknya kadang-kadang kasihan dengan warga yang masih memanfaatkan air sungai untuk mandi kalau pas lagi lihat limbah masuk ke kali"

Dua pernyataan tersebut di atas diperkuat lagi dengan pendapat informan unsur pemerintah kelurahan dari Kelurahan Prapen dengan pernyataan sebagai berikut :

”Masyarakat kami sebenarnya sangat terganggu dengan ”“bebeleng”” (Air Limbah Rumah Tangga) yang senantiasa menjadi sarang nyamuk dan membuat lingkungan kelihatan kotor. Pernah suatu hari kami menerima keluhan warga yang merasa dirugikan oleh ”bebeleng” (air limbah rumah tangga) tetangganya yang membangun pondasi rumahnya dengan tinggi 1 meter sementara air limbahnya dialirkan ke bawah dan melimpah ke pekarangan tetangga sebelahnya yang tidak mampu membangun pondasi tinggi”.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa air limbah domestik di Kota Praya memberikan pengaruh terhadap kenyamanan hidup warga kota.

Kenyataan tersebut diperkuat juga oleh hasil pengumpulan jawaban melalui kuesioner. Dari 109 responden 29,36% menyatakan jijik melihat air limbah domestik terbuang sembarangan, 61,47% menyatakan prihatin dan selebihnya (13,76%) menyatakan biasa saja atau tidak memiliki kesan jijik ataupun prihatin terhadap air limbah yang terbuang sembarangan.

Alasan jijik lebih disebabkan karena kesan yang secara langsung dirasakan seperti menimbulkan bau, tempat berkembangnya penyakit, dan mengurangi keindahan lingkungan. Sedangkan alasan prihatin lebih disebabkan karena kurangnya perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap pengelolaan air limbah itu sendiri. Karena itu responden yang merasa prihatin dan jijik merasa terganggu hingga sangat terganggu dengan kondisi air limbah yang tidak terurus. Persentase responden yang menjawab terganggu dan sangat terganggu masing-masing sebesar 48,62% dan 42,20% sedangkan yang tidak terganggu hanya sebesar 9,17%.

Berdasarkan kesan yang dirasakan tersebut, 49,54% responden selalu memikirkan dampak air limbah domestik terhadap air sungai dan waduk yang dipakai sebagai bahan baku air minum PDAM. Sedangkan 40,37% kadang-kadang memikirkan hal itu dan sisanya 10,09% tidak pernah memikirkan dampak air limbah terhadap air sungai dan waduk.

b. Dampak yang Ditimbulkan oleh Air Limbah Domestik Terhadap Kualitas Air Sungai dan Waduk.

Pengetahuan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan air limbah domestik di Kota Praya sebagian besar hanya sebatas pada apa yang dapat dilihat secara langsung dari dampak air limbah domestik di lingkungannya. Dampak-dampak yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Tempat berkembangnya nyamuk atau sumber penyakit
- Menimbulkan bau (pencemaran udara)
- Mengganggu kesehatan

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan unsur pemerintah kelurahan dari Kelurahan Prapen sebagai berikut :

”Masyarakat lingkungan kami dan Prapen umumnya mengetahui bahwa limbah rumah tangga “bebeleng” menimbulkan bau dan sebagai tempat berkembangnya nyamuk. Bagi yang berpendidikan mungkin mereka sudah tahu bahwa “bebeleng” dapat mencemari air. Menurut saya pengelolaan “bebeleng” ini belum ada perhatian serius dari pemerintah, bentuk perhatian hanya penyuluhan dan diajak membersihkan got”

Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan salah seorang informan unsur tokoh masyarakat dari Kelurahan Leneng sebagai berikut :

”Masyarakat Leneng pada umumnya paham “bebeleng” ini mengganggu kesehatan karena tempat berkembangnya nyamuk, ada perhatian pemerintah terhadap masalah ini tapi belum maksimal seperti membangun WC umum tapi perhatian terhadap pengelolaan “bebeleng”nya belum ada sama sekali dan tetap saja mengalir ke got yang akhirnya ke sungai dan Waduk Batujai”

Hasil pengumpulan jawaban kuesioner diperoleh gambaran tentang pendapat masyarakat terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh air limbah domestik. Persentase frekuensi munculnya pilihan jawaban masyarakat dalam kuesioner yang menyatakan air limbah domestik sebagai tempat berkembangnya nyamuk menduduki peringkat teratas yaitu 32,31% kemudian disusul dengan jawaban menimbulkan bau dan mengganggu pemandangan atau keindahan yaitu masing-masing 21,54% dan 16,92%. Selanjutnya jawaban mengganggu

kesehatan dan menimbulkan pencemaran air sungai atau waduk masing-masing sebesar 12,31% dan 11,28%. Persentase frekuensi kemunculan jawaban menyebabkan pencemaran air tanah menduduki persentase yang paling rendah yaitu hanya 5,64%.

c. Pendapat Masyarakat tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pihak yang Bertanggungjawab

Terkait dengan sistem pengelolaan air limbah domestik diperoleh fakta bahwa hampir semua informan sepakat bahwa air limbah domestik sudah saatnya diberikan perhatian yang proporsional dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan. Upaya tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mendukung keberlanjutan upaya pengelolaan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik tersebut maka sebagian informan menyatakan harus diserahkan pengelolaannya kepada masing-masing KK atau jika harus berkelompok maka dalam jumlah yang terbatas. Pengelolaan air limbah domestik dalam skala besar membutuhkan manajemen yang lebih rumit dan kompleks. Berikut petikan hasil wawancara dengan informan kunci dari aparat pemerintah Kelurahan Prapen sebagai berikut :

”Masyarakat di sini cenderung menginginkan pengolahan secara individu ataupun jika berkelompok saya melihat akan lebih efektif jika dalam jumlah yang terbatas. Pengalaman menunjukkan bahwa jika dalam jumlah banyak susah sekali pemeliharaannya. WC umum yang dibangun pemerintah sekarang sudah rusak semua karena sering ada yang BAB tidak menyiram kloset, akhirnya yang BAB berikutnya kesal dan merusak kloset”

Pendapat tersebut didukung pula pendapat informan unsur masyarakat di Kelurahan Leneng sebagai berikut :

”Kalau secara umum memang sudah saatnya apalagi dengan berkembangnya jumlah penduduk seharusnya mulai dari sekarang masalah ini di pikirkan sebelum menjadi parah. Menurut saya air limbah sebaiknya diolah secara komunal karena ini menyangkut masalah bersama dan ini membutuhkan kerjasama pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini saya siap mendukung”

Informan unsur masyarakat dari Kelurahan Tiwugalih juga berpendapat senada namun dengan sistem komunal dengan pernyataannya sebagai berikut :

”Sudah saatnya air limbah domestik dikelola sebab kalau penduduk sudah padat permasalahannya akan menjadi rumit dan dalam hal ini dibutuhkan peran semua pihak. Pengolahannya sebaiknya secara berkelompok agar pembinaan oleh pemerintah lebih mudah”

Demikian pula informan unsur masyarakat dari Kelurahan Praya juga berpendapat sama tetapi mengenai sistemnya membutuhkan kajian lebih mendalam. Pernyataannya sebagai berikut :

”Malah pengelolaannya seharusnya dari dulu kalau menurut saya sehingga lingkungan kota menjadi bersih. Oleh karena itu mumpung belum padat penduduk sekaranglah saatnya. Semua komponen masyarakat, pemerintah dan pengusaha harus mengambil bagian dalam masalah ini. Menegenai bagaimana sistimnya perlu dikaji lebih dalam”.

Pernyataan-pernyataan yang terungkap dari hasil wawancara tergambar pula melalui pengumpulan jawaban kuesioner sebagai berikut : 84,40% responden menyatakan air limbah domestik sudah saatnya dilakukan pengolahan, 6,42% menyatakan tidak tahu dan hanya 9,17% menyatakan belum saatnya. Tanggung jawab pengelolaan air limbah, menurut 89,91% responden, merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sedangkan 4,59% menyatakan tanggung jawab masyarakat saja dan hanya 5,50% responden menyatakan tanggung jawab pemerintah saja. Sistem pengolahan air limbah domestik, 52,29% responden setuju dilakukan pengolahan secara individual, 34,86% setuju diolah secara berkelompok dengan jumlah terbatas, 12,84% setuju dilakukan pengolahan secara komunal dan tidak ada seorangpun responden yang menyatakan tidak perlu diolah.

d. Keinginan masyarakat untuk mengelola air limbah domestik

Pada umumnya masyarakat Kota Praya menginginkan ada pengelolaan air limbah domestik sebagaimana pengelolaan sampah sehingga air limbah tidak menjadi masalah di lingkungan mereka. Berikut petikan hasil wawancara dengan informan unsur tokoh masyarakat dari Kelurahan Prapen :

”Saya yakin masyarakat di sini mau melakukan pengelolaan air limbah, seperti sampah. Buktinya ketika diajak kerja bakti pembersihan got di sekitar rumah mereka, yang dilakukan setiap jumat pertama setiap bulan mereka kelihatan ramai gotong royong”

Informan unsur tokoh masyarakat dari Kelurahan Leneng juga berpendapat sama yaitu :

”Kalau masyarakat diajak dengan bijak disertai dengan penjelasan-penjelasan yang pas masyarakat pasti mau melakukan pengelolaan sesuai petunjuk”

Pendapat tersebut diperkuat oleh informan unsur tokoh masyarakat dari Kelurahan Praya sebagai berikut :

”Kami ingin ada pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya kami merasa terganggu dengan air limbah domestik dan kami mendambakan lingkungan yang bersih dan sehat. Adapun kalau ada yang belum memikirkan untuk melakukan pengelolaan karena mereka dapat membuang langsung air limbahnya ke sungai yang senantiasa mengalir terus”.

Dari hasil pengumpulan kuesioner diperoleh gambaran persentase responden yang memiliki keinginan pengelolaan air limbah domestik sebagai berikut : 74,31% dari 109 orang responden memiliki keinginan untuk melakukan pengelolaan terhadap air limbahnya sedangkan 25,69% belum memikirkan untuk melakukan pengelolaan air limbahnya.

e. Pendapat Masyarakat Tentang Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan Air Limbah

Kinerja pemerintah terhadap pengelolaan air limbah domestik masih rendah karena belum dijadikan prioritas dalam program pembangunan daerah. Seluruh informan memiliki pendapat sama tentang tingkat kinerja pemerintah terhadap pengelolaan air limbah domestik. Berikut petikan hasil wawancara dengan beberapa informan.

Informan unsur tokoh masyarakat dari Kelurahan Leneng melihat perhatian pemerintah dari beberapa sudut pandang sebagai berikut :

”Kinerja pemerintah belum ada apa-apanya, mereka sepertinya belum bangun dengan kondisi kota yang belum berkembang. Mereka masih terlena dengan kondisi sekarang padahal ini saat yang baik untuk mengatur segalanya terutama masalah air limbah domestik. Kalau sudah seperti kota besar untuk mengatur PKL saja contoh kecilnya itu sangat susah apalagi air limbah yang semua manusia menghasilkan air limbah”

Pendapat tersebut didukung oleh tokoh masyarakat dari Kelurahan Prapen dengan memberikan bukti nyata di lapangan sebagai berikut :

"Kami berpendapat bahwa pengelolaan bebeleng ini belum ada perhatian serius dari pemerintah, bentuk perhatian hanya penyuluhan dan diajak membersihkan got adapun pembangunan septiktank saya lihat KPMLH bekerja setengah-setengah tidak sampai tuntas karena pelibatan masyarakat sangat kurang"

Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat dari tokoh masyarakat dari Kelurahan Praya yang menyatakan bahwa :

"Pemerintah cenderung berorientasi proyek. Begitu selesai proyek tidak ada tindak lanjut dalam rangka pembinaan masyarakat sehingga umur bangunan biasanya tidak lama"

Informan dari ketua LSM YLDM Kota Praya memberikan gambaran tentang ukuran dalam menilai kinerja pemerintah dengan pernyataannya sebagai berikut :

" Kinerja pemerintah sebenarnya bisa diukur dari sejauh mana dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Kalau kinerja pemerintah kita ukur dari sejauh mana pembangunan yang bersifat fisik itu salah besar. Yang utama sebenarnya adalah kemampuan pemerintah memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat dapat menemukan sendiri permasalahannya dan memecahkan permasalahan tersebut. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam melakukan need assesment pada masyarakat"

Pendapat LSM tersebut didukung pula oleh pendapat dari Ketua LSM yang lain yaitu LSM PERAN dengan pernyataannya sebagai berikut :

"Pemerintah kurang melibatkan masyarakat dalam perencanaan sehingga masyarakat bersifat masa bodoh terhadap hasil pembangunan"

Informan unsur masyarakat bahkan berpendapat dengan memberikan bukti lapangan sebagai berikut :

"Perhatian pemerintah ada, cuma saya lihat belum terpadu antara instansi yang terkait. Saya lihat mereka tidak ada koordinasi. Dua tahun yang lalu ada pembangunan saluran pembuangan limbah oleh KPMLH, tapi sebetulnya itu saluran air yang mestinya dibuat oleh Kimpraswil"

Gambaran pendapat masyarakat ditunjukkan pula dari hasil pengumpulan jawaban kuesioner tentang kinerja pemerintah terhadap pengelolaan air limbah domestik. Jawaban responden berkisar antara perhatian pemerintah terhadap pengelolaan air limbah yang sangat besar hingga pemerintah tidak ada perhatian sama sekali. Responden yang menjawab perhatian pemerintah sangat besar dan besar masing-masing sebanyak 11,01% dan 12,84%, yang menyatakan sedang

44,95%, yang menyatakan kurang 31,19%, sedangkan yang menyatakan tidak ada sama sekali sebesar 0%.

4.2.9. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat merupakan aspek yang sangat menentukan dalam keberhasilan upaya pengelolaan air limbah domestik. Pemerintah akan sulit mencapai keberhasilan programnya tanpa dukungan peran serta aktif seluruh masyarakat.

a. Kegiatan-kegiatan Bersama di Lingkungan Kelurahan yang Masih Ada dan Terus Dilaksanakan

Kegiatan-kegiatan gotong royong di masing-masing kelurahan di Kota Praya masih ada. Bentuk gotong royong yang ada dan masih terus berjalan misalnya pembersihan sampah, drainase, pembangunan masjid, ronda malam, perbaikan jalan, arisan dan lain-lain. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan tersebut juga terlihat masih baik meskipun sudah agak menurun. Hal ini ditunjukkan oleh hasil wawancara dengan informan unsur masyarakat dari Kelurahan Leneng. Berikut petikan hasil wawancaranya :

"Minimal 1kali sebulan ada saja kegiatan dari pak RT mengajak bergotong royong. Bentuknya pembersihan sampah dan saya selalu ikut dalam kegiatan itu, walaupun saya tidak sempat ada anggota keluarga yang mewakili".

Gambaran partisipasi masyarakat Kota Praya dalam kegiatan gotong royong di lingkungannya diperoleh juga dari seorang informan unsur tokoh masyarakat dari Kelurahan Praya sebagai berikut :

"Kalau sekedar gotong royong atau kerja bakti yang sifatnya temporer masyarakat kelurahan Praya dan saya kira di Kota Praya masih cukup baik tapi yang terpenting itu adalah bagaimana menanamkan perilaku hidup bersih pada masyarakat sehingga tanpa digerakkan mereka dapat bergerak sendiri".

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kegiatan gotong royong itu hanya terlaksana jika digerakkan oleh Ketua RT, artinya kesadaran masyarakat masih kurang untuk melakukan kegiatan membersihkan lingkungan. Hal ini

dipertegas lagi oleh informan unsur tokoh masyarakat dari Kelurahan Tiwugalih dengan pernyataannya sebagai berikut :

”Tingkat partisipasi masyarakat sekarang ini sudah agak turun semenjak reformasi, apalagi tujuan dan manfaatnya tidak jelas mereka sulit diajak. Pengalaman saya, dulu pernah ada WC umum awalnya pemeliharaan kebersihan cukup baik tetapi ketika makin banyak sampah, air limbahnya menggenang dari mereka tidak ada yang berinisiatif untuk memulai upaya pemeliharaan sehingga lambat laun WC umum rusak dan tidak dapat digunakan lagi” .

b. Kesiediaan Masyarakat Berpartisipasi Dalam Pengolahan Air Limbah Domestik

Jika ada pembangunan alat pengolah air limbah domestik sebagai bagian dari pengelolaan air limbah domestik diperoleh gambaran bahwa masyarakat bersedia berpartisipasi dengan catatan programnya harus jelas dan bermanfaat. Berikut petikan hasil wawancara dengan informan unsur tokoh masyarakat dari Kelurahan Prapen sebagai berikut :

”Saya bisa menjamin masyarakat di Kelurahan Prapen ini masih memiliki jiwa gotong royong yang tinggi tetapi dalam bentuk tenaga. Ketika diminta sumbangan dalam bentuk uang ini yang sulit karena mereka memiliki penghasilan yang kurang. Disamping itu krisis kepercayaan terhadap pemegang dana juga mempengaruhi mereka”

Informan unsur LSM memperjelas faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dengan pernyataannya sebagai berikut :

”Kesiediaan masyarakat untuk berpartisipasi tergantung sejauh mana kita dapat memberdayakan mereka. Selama ini masyarakat kita belum sepenuhnya diajak untuk mengenal dan mengidentifikasi permasalahannya sendiri secara menyeluruh. Yang dilakukan pemerintah hanya bersifat kegiatan sesaat dan tidak berkelanjutan. Mestinya masyarakat diajak untuk menemukan permasalahan pokok yang ada sehingga apa yang akan diberikan benar-benar merupakan kebutuhan bukan keinginan”.

Hasil pengumpulan jawaban kuesioner juga memberikan gambaran 100% responden bersedia berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik.

c. Bentuk Partisipasi Yang Akan Diberikan

Bentuk partisipasi masyarakat yang paling mudah diperoleh di Kota Praya adalah bentuk sumbangan tenaga dan pikiran. Bentuk partisipasi dalam bentuk material biasanya agak sulit. Dari hasil wawancara terungkap bahwa disamping disebabkan karena faktor kurangnya penghasilan juga disebabkan oleh krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berikut petikan hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Prapen :

"Masyarakat kami selalu siap diajak bergotong royong dalam kegiatan kemasyarakatan. Tetapi yang agak sulit ketika masyarakat diajak menyumbang dalam bentuk uang. Dalam bentuk tenaga mereka siap. Hal ini disebabkan karena disamping mereka kebanyakan berpenghasilan rendah mereka juga terpengaruh oleh kasus-kasus korupsi yang tidak tuntas yang banyak mereka tonton di TV"

Penelusuran lebih jauh dalam mengungkapkan pendapat masyarakat diperoleh pernyataan yang senada dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Kelurahan Prapen tersebut yaitu :

"Insyaallah dalam bentuk sumbangan tenaga saya siap sebab kalau dalam bentuk uang kayaknya saya tidak bisa janji karena saya melihat di televisi banyak sekali koruptor yang tidak mendapat hukuman yang setimpal, malah masyarakat kecil disuruh menyumbang itu tidak adil"

Gambaran tersebut didukung oleh hasil pengumpulan jawaban kuesioner dari 109 responden dengan persentase sebagai berikut : 60,55% siap berpartisipasi dalam bentuk tenaga, 26,61% dalam bentuk sumbangan pikiran/gagasan, 16,51% dalam bentuk uang, dan dalam bentuk material/barang serta lain-lain (sesuai kemampuan) masing-masing sebesar 8,21%.

d. Tahap/Waktu Berpartisipasi

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dimulai sejak perencanaan hingga operasional. Hal ini menurut informan akan menjamin keberlanjutan hasil program pengelolaan air limbah domestik. Petikan hasil wawancara dari informan unsur masyarakat biasa dari Kelurahan Praya sebagai berikut :

"Seharusnya mulai berpartisipasi itu sejak perencanaan hingga operasional supaya proyek berkelanjutan, sebab kegagalan pembangunan sekarang ini karena kurangnya pelibatan masyarakat sejak awal".

Tokoh Masyarakat Kelurahan Tiwugalih juga berpendapat sama yaitu sebagai berikut :

”Jika pemerintah ingin programnya berhasil terutama dalam hal air limbah rumah tangga ini dan saya kira program-program yang lain maka saran saya manfaatkanlah peran Tuan Guru yang ada di daerah kita, mengingat tipikal masyarakat kita yang masih sangat patuh pada tuan guru. Selama ini yang dijadikan materi pengajian oleh para tuan guru adalah pahala puasa, sholat, haji dan sejenisnya tetapi coba masalah “bebeleng” (air limbah rumah tangga) ini dikaitkan dengan agama, saya yakin masyarakat dengan sukarela untuk mengelola limbahnya sendiri”.

Wawancara dengan LSM juga memiliki pendapat yang sama bahwa pembangunan akan berhasil jika partisipasi masyarakat dimulai sejak perencanaan hingga operasional.

”Untuk menjamin keberlanjutan hasil pembangunan maka partisipasi masyarakat harus dimulai sejak perencanaan hingga operasional”

Gambarannya tersebut didukung juga oleh jawaban kuesioner dari 109 responden yaitu 35,78% sejak perencanaan hingga operasional, 33,94% menjawab kapan saja dibutuhkan (potensial sejak perencanaan hingga operasional), 11,93% sejak perencanaan, 12,84% pada tahap operasional dan 6,42% pada tahap konstruksi.

e. Kendala-Kendala Dalam Menyalurkan Aspirasi

Masyarakat Kota Praya ternyata masih memiliki kendala dalam menyalurkan aspirasinya. Kendala tersebut berupa tidak ditanggapinya aspirasinya yang dapat dilihat dari sulitnya realisasi usulan masyarakat yang tertuang dalam musrenbang. Dari hasil wawancara terungkap beberapa penyebabnya antara lain usulan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) sering mendominasi dalam musrenbang tingkat kecamatan atau kabupaten sehingga usulan masyarakat menjadi hilang. Berikut petikan hasil wawancara dengan tokoh LSM yang setiap tahun mengikuti Musrenbang baik ditingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten sebagai berikut :

“Pengalaman saya dalam setiap mengikuti musrenbang dari tingkat kelurahan hingga Kabupaten sering saya menemukan beberapa hal :

a. Usulan masyarakat dari desa/kelurahan (hasil musrenbang desa/kelurahan) ketika sampai di kecamatan didominasi oleh program atau usulan kegiatan dari SKPD

- b. Beberapa program masyarakat desa/kelurahan sering hilang, karena kurang kontrol oleh delegasi pengawal dari desa/kelurahan karena kurangnya SDM delegasi”*

Secara umum kendala tersebut terungkap melalui pengumpulan jawaban kuesioner dari 109 responden sebagai berikut : 16,51% menjawab aspirasi tidak ditanggapi, yang menjawab jarang ditanggapi dan mekanismenya berbelit-belit masing-masing sebesar 28,44% dan 17,43%, tidak tahu caranya 2,75%, tidak bisa berbicara di depan umum 0% dan lainnya (misalnya : untuk menyukseskan usulan pembangunan di kelurahan tergantung lobi dengan pengambil kebijakan di kabupaten) sebesar 16,51%.

4.2.10 Mekanisme Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan bidang sanitasi di Kabupaten Lombok Tengah belum sepenuhnya mencerminkan pembangunan yang partisipatif. Pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik seringkali tidak melibatkan masyarakat bahkan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak melalui forum musrenbang.

Pembangunan Septiktank komunal di Kelurahan Prapen merupakan salah satu contoh pembangunan yang tidak partisipatif. Ditinjau dari sisi perencanaan lahirnya proyek itu berdasarkan adanya alokasi dana dari dana perimbangan pusat Departemen Keuangan RI dengan sasaran bidang air bersih dan penyehatan lingkungan. Dengan tersedianya dana tersebut maka dibuatlah kegiatan yang sesuai dengan juknis yang dibuat oleh Departemen Keuangan RI.

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh LSM yang selalu aktif dalam mengikuti musrenbang terungkap bahwa program SKPD ternyata seringkali mendominasi usulan dari bawah.

”Seringkali usulan dari kelurahan (hasil musrenbang kelurahan) ketika sampai di kecamatan didominasi oleh program/usulan SKPD. Beberapa usulan masyarakat sering hilang, karena kurang kontrol oleh tim delegasi dari kelurahan. Namun demikian mekanisme dan proses musrenbang sudah mengarah pada proses partisipasi karena adanya kolaborasi antara konsorsium LSM, Program dan Pemda dalam memfasilitasi musrenbang”

4.3. Analisis Kondisi Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Praya

4.3.1 Analisis Persepsi dan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Pengelolaan air limbah domestik seharusnya lebih bersifat *bottom-up* sehingga perlu ditanamkan nilai-nilai atau pemahaman yang berkenaan dengan pengelolaan air limbah domestik pada masyarakat baik berupa dampaknya pada kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dari sini diharapkan muncul suatu gerakan dari dalam masyarakat untuk mengelola air limbah domestik dengan cara-cara yang arif dan benar.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di masyarakat Kota Praya bahwa pemahaman masyarakat tentang air limbah domestik hanya terbatas pada dampak yang dapat dilihat dan dirasakan secara visual dan seketika, seperti menimbulkan bau, membuat lingkungan kotor dan sebagai tempat berkembangnya nyamuk. Sementara dampak air limbah domestik terhadap pencemaran air tanah dan air permukaan hanya sebagian kecil yang mengetahui. Hal ini memberikan gambaran bahwa pemahaman masyarakat tentang air limbah domestik terkait dengan dampaknya terhadap pencemaran air masih rendah. Tetapi di sisi lain masyarakat kelihatan cukup kritis melihat perhatian pemerintah terhadap keberadaan air limbah domestik di Kota Praya. Sebagian besar masyarakat merasa prihatin terhadap kurangnya upaya pemerintah dalam mengelola air limbah domestik. Hal ini merupakan sebuah potensi yang dapat dijadikan *entry point* bagi pemerintah untuk mengajak masyarakat secara bersama-sama melakukan pengelolaan air limbah yang berbasis masyarakat.

Peluang untuk merubah persepsi masyarakat dalam rangka meningkatkan peran serta mereka dalam pengelolaan air limbah domestik ditunjukkan juga dari pendapat masyarakat tentang tanggung jawab pengelolaan air limbah domestik. Menurut sebagian besar masyarakat, tanggung jawab pengelolaan air limbah domestik terletak bukan saja pada pemerintah tetapi juga semua unsur masyarakat. Hal ini juga menggambarkan bahwa inisiator awal dalam memulai pengelolaan air limbah domestik tidak harus berasal dari pemerintah tetapi bisa saja dari masyarakat, LSM, swasta atau unsur yang lain dalam masyarakat.

Dalam pengelolaan air limbah domestik harus terdapat suatu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, agar tujuan pengelolaan dapat berhasil sesuai yang diharapkan dalam mendukung terciptanya lingkungan yang sehat. Keduanya harus mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakatnya karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru.

Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pengelolaan air limbah domestik maka masyarakat membutuhkan pemahaman yang utuh tentang dampak air limbah domestik terhadap sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah. Dengan pemahaman yang baik pada masyarakat tentang air limbah diharapkan akan melahirkan inisiatif yang konstruktif dalam upaya pengelolaan air limbah domestik. Dengan demikian masyarakat tidak lagi memandang air limbah domestik hanya sebatas jijik dan prihatin apalagi menganggap biasa saja tetapi menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Langkah yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, menurut informan kunci dari unsur tokoh masyarakat adalah dengan memanfaatkan peran *tuan guru* dalam membina masyarakat. *Tuan guru* merupakan seorang pemuka agama yang senantiasa memberikan bimbingan agama kepada masyarakat yang sangat dihormati oleh masyarakat di Pulau Lombok umumnya dan di Kabupaten Lombok Tengah khususnya. Di Pulau Jawa *tuan guru* sama dengan seorang kyai.

Panatisme masyarakat terhadap *tuan guru* di Pulau Lombok sangat tinggi. Jika peran *tuan guru* ini dapat dimanfaatkan dengan baik dalam upaya pengelolaan air limbah domestik, pemerintah akan mendapatkan kemudahan dalam mengajak masyarakat berperan serta aktif bahkan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Peran *tuan guru* di Kabupaten Lombok Tengah

selama ini lebih banyak membina masyarakat terkait dengan hubungan kepada Tuhan dan sesama manusia. Materi yang diberikan dalam setiap dakwahnya berkisar pada ibadah sholat, puasa, akhlak, muamalah dan sejenisnya. Oleh karena itu ke depan diharapkan peran *tuan guru* dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan persepsi masyarakat terhadap air limbah domestik.

Persepsi masyarakat terhadap air limbah domestik memiliki pengaruh terhadap perlakuan masyarakat terhadap air limbah domestik itu sendiri. Semakin baik kualitas persepsi masyarakat maka perlakuan terhadap air limbah domestik semakin meningkat. Beberapa perlakuan masyarakat terhadap air limbah domestik di Kota Praya yang merupakan bentuk partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Membersihkan saluran drainase dalam kampung atas ajakan ketua RT selaku ketua POKJA Kesehatan di beberapa kelurahan di Kota Praya.
Tujuan pembersihan saluran drainase ini adalah untuk menghambat perkembangan nyamuk yang dapat membawa bibit penyakit, mengurangi bau yang mengganggu warga dan meningkatkan kebersihan lingkungan.
2. Membuang air limbah domestik ke sungai, selokan/got/drainase kota.
Perlakuan ini dilakukan karena tidak membutuhkan biaya, tidak ada larangan dan lebih mudah. Prinsip NIMBY (*Not In My Back Yard*) pada air limbah domestik ternyata juga berlaku di Kota Praya.
3. Pemanfaatan air limbah domestik untuk menyiram jalan pada siang hari.
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar debu jalan tidak mengganggu warga ketika ada angin atau kendaraan lewat sekaligus menguras air limbah domestik yang tergenang..

Berangkat dari hasil analisis tersebut maka dalam pembangunan pengelolaan air limbah harus diterapkan pendekatan partisipasi pada proses perencanaan, konstruksi, dan operasi. Hasil observasi di lapangan dari gambaran jawaban responden, 34,62% menjawab menginginkan berpartisipasi sejak perencanaan hingga operasional sedangkan 42,31% menjawab kapan saja dibutuhkan (potensi sejak perencanaan hingga operasional).

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun. Prinsip kerja dari pembangunan melalui partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Program kerja disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dengan melakukan komunikasi partisipatif agar mendapat dukungan masyarakat
2. Program kerja dilakukan melalui kerjasama kelompok masyarakat, pejabat kelurahan dan segenap warga untuk memperkecil hambatan
3. Koordinasi selalu dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal
4. Bersungguh dan tidak mengumbar janji
5. Tidak bersifat merasa paling tahu dalam setiap kesempatan pelaksanaan program

Intinya *Community development* dengan segala kegiatannya dalam pembangunan, menurut Ndraha (1990), harus menghindari metode kerja *doing for the community* tetapi mengadopsi metode *doing with the community*. Metode yang pertama akan menjadikan masyarakat menjadi pasif, kurang kreatif dan tidak berdaya bahkan mendidik masyarakat untuk bergantung kepada pemerintah. Sedang metode yang kedua merangsang masyarakat menjadi aktif dan dinamis serta mampu mengidentifikasi mana kebutuhan yang sifatnya *real needs, felt needs dan expected needs*. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pendampingan dan fasilitasi agar terbentuk peningkatan partisipasi dan keterlibatan seluruh stakeholder, terutama masyarakat dalam suatu perencanaan, operasi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana

Kenyataan di Kabupaten Lombok Tengah, proses perencanaan yang partisipatif telah dilaksanakan melalui proses musrenbang. Akan tetapi dalam proses musrenbang ternyata banyak hal yang mengotori makna partisipatif. Hal ini terungkap dari pengalaman seorang informan dari LSM bahwa usulan dari

bawah yang telah disusun dengan memakan waktu dan tenaga cukup banyak ternyata setelah sampai di Musrenbang tingkat kecamatan atau kabupaten banyak didominasi oleh usulan SKPD yang belum tentu partisipatif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya SDM “pengawal” usulan dari kelurahan ketika pembahasan di tingkat kecamatan dan kabupaten dilaksanakan.

4.3.2 Kelembagaan dan Kebijakan

1. Aspek Hukum dan Regulasi

Keberhasilan jasa sanitasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Aspek hukum dan peraturan diidentifikasi sebagai salah satu dari sejumlah aspek yang perlu didorong untuk menciptakan lingkungan yang mendukung.

Untuk mencapai penatalaksanaan air limbah domestik perkotaan yang lebih baik diperlukan perhatian terhadap tiap-tiap bagian proses penatalaksanaannya: (1) perencanaan dan pengembangan program, (2) perancangan, (3) pembangunan, (4) operasional dan pemeliharaan, dan (5) pemantauan. Kerangka perundangan dan peraturan yang jelas harus dirancang untuk mendorong bagaimana proses penatalaksanaan ini dapat diatur dengan baik. Sebuah penelitian menyeluruh diperlukan untuk mengevaluasi kondisi yang ada sebagai berikut: bagaimana peraturan mengatur penatalaksanaan air limbah domestik secara keseluruhan, identifikasi aspek-aspek peraturan diperlukan untuk menciptakan peran lebih banyak dari pemerintah daerah dan pusat serta rekomendasi.

Sejauh ini, tidak ada perundangan khusus yang mengatur penatalaksanaan limbah domestik kota karena sebagian besar peraturan ditetapkan untuk perlindungan lingkungan dan kesehatan lingkungan, bukan penatalaksanaan air limbah. Dengan cara lain, untuk mencapai perlindungan lingkungan dan kesehatan lingkungan, penatalaksanaan air limbah domestik menjadi bagian yang penting (Bappenas, 2006).

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, peraturan tentang penatalaksanaan air limbah domestik hingga saat ini belum ada. Akibatnya pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya menjadi terkesampingkan. Padahal resiko pencemaran air akibat air limbah domestik cukup besar seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Oleh karena itu program penyehatan lingkungan yang melekat pada Dinas Kesehatan saat ini harus mengintegrasikan pengelolaan air limbah domestik.

2. Kelembagaan

Ditinjau dari aspek kelembagaan, ada beberapa instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan air limbah domestik. Instansi-instansi tersebut adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL), Dinas Kesehatan dan Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup (KPMLH) serta Bapeda Kabupaten Lombok Tengah.

Namun demikian terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari ketiga instansi tersebut, yaitu :

1. Belum adanya pembagian peran yang jelas antara regulator, operator dan fasilitator.

Mengacu pada tugas pokok instansi vertikal di tingkat pusat, Dinas Kimpraswil seharusnya bertugas dalam teknik operasional prasarana dan sarana air limbah domestik. Dinas Kesehatan bertugas sebagai fasilitator dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat dan KPMLH selaku pembuat aturan (regulator).

Hasil observasi di lapangan pelaksanaan tupoksi sebagaimana yang ada di pusat, di Kabupaten Lombok Tengah tidak demikian. KPMLH di samping sebagai pemantau dan pengawas kualitas lingkungan juga melaksanakan tugas dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Kimpraswil. Demikian juga Dinas Kesehatan memberikan bantuan MCK Umum yang seharusnya merupakan tugas pokok Dinas Kimpraswil. Seharusnya KPMLH menyusun peraturan-peraturan tentang penetapan kelas air, penetapan baku mutu air limbah domestik atau peraturan di

bidang perijinan pembuangan air limbah domestik dan lain-lain sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.

Berdasarkan gambaran tersebut terlihat bahwa di Kabupaten Lombok Tengah belum ada *role sharing* (pembagian peran) yang jelas antara instansi yang terkait air limbah domestik. Hal ini berdampak pada tidak adanya keterpaduan program antara instansi terkait, bahkan sering terjadi tumpang tindih kegiatan. Oleh karena itu diperlukan penguatan koordinasi antara instansi yang memiliki tupoksi terkait air limbah domestik karena dalam pengadaan layanan pengelolaan air limbah domestik akan menyangkut pengadaan infrastruktur, pengawasan air limbah buangan yang dihasilkan serta dampak kesehatan dan sosial bagi masyarakat.

2. Pengelolaan air limbah domestik selama ini di Kota Praya terbatas pada peningkatan aspek sanitasi saja seperti pembersihan saluran drainase yang mestinya juga harus mempertimbangkan aspek pengelolaan sumber daya air dan lingkungan. Pembersihan saluran yang mampet oleh sampah akan memperlancar air limbah domestik mengalir ke sungai yang pada akhirnya dapat mencemari air sungai, demikian juga air limbah domestik yang mampet akan mengancam tercemarnya air tanah. Peningkatan aspek sanitasi belum terintegrasi dengan upaya pengelolaan sumber daya air dan lingkungan.
3. Pembiayaan dalam pengelolaan air limbah domestik masih kurang tersedia. Pembiayaan merupakan aspek yang penting dalam pengelolaan air limbah domestik. Sumber pembiayaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Lombok Tengah hanya berasal dari pemerintah daerah saja sementara kemampuan daerah untuk itu juga terbatas.

Di tingkat masyarakat kelembagaan pengelolaan air limbah domestik yang diinginkan masyarakat terungkap beberapa syarat yaitu sebagai berikut :

1. Dekat dengan kehidupan mereka karena dengan kedekatannya diharapkan lebih memahami kebutuhan masyarakatnya

2. Memiliki kejujuran dalam mengemban amanat orang banyak artinya dalam melaksanakan tugas pengelolaan air limbah domestik yang dipercayakan kepadanya harus transparan dan dapat dipercaya.
3. Memiliki rencana dan tujuan yang jelas.

4.3.3 Analisis teknologi Pengelolaan Air Limbah Domestik

1. Dasar pertimbangan

Dalam menentukan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik perlu diketahui terlebih dahulu beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut (SNI Pd-T-04-2005-C) :

a. Konsumsi air rata-rata perjiwa setiap hari

Berdasarkan hasil observasi di lapangan konsumsi air per KK di Kota Praya rata-rata 23,053 m³ per bulan atau sama dengan 23.053 liter/KK/bulan. Data Kecamatan Praya Dalam Angka jumlah jiwa per KK rata-rata 4 orang. Dengan demikian konsumsi air rata-rata perjiwa setiap hari di Kota Praya sama dengan $23.053 \text{ lt} : 30 \text{ hari} : 4 \text{ orang} = 192,1 \text{ liter}$. Limbah yang dihasilkan manusia dapat dihitung sebesar 80% dari konsumsi air (Dep. PU, 2007). Berdasarkan perhitungan tersebut berarti jumlah limbah yang dihasilkan per orang di Kota Praya = $80\% \times 192,1 \text{ liter} = 153,69 \text{ ltr perhari}$

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di atas 100 orang per ha penggunaan sistem *on site* akan memberikan dampak pencemaran yang sangat nyata terhadap air tanah dan air permukaan sekitarnya (Bappenas, 2007). Di Kota Praya yang terdiri dari 9 kelurahan rata-rata kepadatan penduduk baru mencapai 18 orang per ha, sehingga penggunaan sistem *on-site* masih relevan.

c. Kedalaman air tanah

Hasil observasi terhadap sumur yang ada di Kota Praya bahwa ke dalaman air sumur berkisar antara 5 – 15 meter.

d. Ketersediaan pekarangan

Ketersediaan pekarangan di Kota Praya umumnya masih luas, hal ini dapat dilihat dari kepadatan penduduk.

2. Alternatif Pelayanan

Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka pelayanan sanitasi dengan sistem *on-site* masih dapat diterapkan di Kota Praya.

3. Alternatif teknologi

Pilihan teknologi penanganan sanitasi sangat beragam, dari yang sederhana hingga yang paling rumit dan canggih, konvensional atau inkonvensional. Antara pilihan teknologi dengan investasi terdapat keterkaitan erat dengan kemampuan sumber daya terutama dana dan SDM serta tingkat sosial ekonomi masyarakat. Sumber daya yang rendah menyebabkan kecenderungan pengembangan sanitasinya lebih ke sistem *on-site*, dan kemudian seiring dengan adanya peningkatan sumber daya maka pengembangan teknologi mengarah kepada *sistem off-site*.

Pada alternatif sistem *on-site* ada dua jenis sarana yang digunakan untuk menampung air limbah domestik yaitu sistem cubluk dan *septic tank*. Cubluk adalah lubang yang digali di dalam tanah dengan diameter 1,5 meter dengan kedalaman 2 meter dan biasanya diberi dinding batu kosong untuk memudahkan penyerapan air ke dalam tanah. Air limbah domestik di alirkan ke dalam lubang ini. *Septic tank* adalah bak di dalam tanah dari pasangan batu kedap air yang terdiri dari 2 ruang dan dibatasi oleh sekat berlubang untuk meningkatkan efisiensi pengendapan. Bangunan *septic tank* dilengkapi bidang peresapan air yang terdiri dari batu kral dilapisi ijuk untuk selanjutnya diresapkan ke dalam tanah.

4.4 Analisis Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik

4.4.1. Identifikasi masalah

Dari hasil observasi dan analisis kondisi pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan buruknya pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya sebagai berikut :

1. Terbatasnya pemahaman masyarakat akan dampak air limbah domestik terhadap sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah sehingga melahirkan persepsi yang terbatas terhadap air limbah domestik.
2. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan air limbah domestik masih kurang, sehingga bangunan pengelolaan air limbah domestik tidak dimanfaatkan oleh masyarakat
3. Pembagian peran (*role sharing*) antara Dinas/instansi pemerintah yang terkait belum dipahami dengan jelas sehingga sering terjadi tumpang tindih kegiatan antar instansi.
4. Upaya pengelolaan air limbah yang telah berjalan belum terintegrasi dengan pengelolaan sumber daya air
5. Peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik belum ada termasuk peraturan penetapan kelas air, kualitas air limbah domestik yang dapat dibuang ke lingkungan serta pengawasan pembuangan air limbah domestik.
6. Sumber pembiayaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Lombok Tengah hanya berasal dari pemerintah daerah saja sementara kemampuan daerah untuk itu juga terbatas

4.4.2. Formulasi Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan air limbah domestik adalah melindungi sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah di Kota Praya, dari pencemaran oleh air limbah domestik kota. Selain itu Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sehingga terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh dampak ikutan dari keberadaan air limbah domestik.

4.4.3. Penilaian Situasi / Analisis Kondisi

Dalam penilaian situasi ini alat analisis yang digunakan adalah Analisis SWOT dengan menggambarkan kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal menggambarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dan kondisi eksternal menggambarkan peluang dan ancaman dalam rencana pengelolaan air limbah domestik. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan terhadap kondisi eksisting dan kajian pustaka, maka kondisi internal dan eksternal yang dimiliki Kota Praya saat ini adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strengths-S*)

- a. Adanya dinas/instansi yang berkompeten terhadap air limbah domestik yaitu Subdin Tata Kota dan Permukiman pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, Subdin Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan dan Seksi Pemantauan dan Pengawasan pada Kantor Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup serta Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah beserta tupoksi yang melekat pada dinas instansi tersebut
- b. Adanya keinginan masyarakat Kota Praya untuk melakukan pengelolaan air limbah domestik
- c. Adanya *Tuan Guru* sebagai tokoh panutan kuat masyarakat Kabupaten Lombok Tengah umumnya dan Kota Praya khususnya.
- d. Adanya LSM Peduli Lingkungan
- e. Adanya lembaga lokal di tengah masyarakat

2. Kelemahan (*Weaknesses-W*)

- a. Implementasi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing dinas/instansi sering tumpang tindih
- b. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah domestik

- c. Program penyehatan lingkungan belum terintegrasi dengan pengelolaan sumber daya air, akibatnya air limbah domestik dikelola dengan sistem buang dengan prinsip asal tidak mengganggu tempat tinggal sementara sumber daya air seperti sungai dan waduk serta air tanah terancam pencemaran.
- d. Proses perencanaan dalam musrenbang belum sepenuhnya partisipatif karena usulan kegiatan sering didominasi oleh usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- e. Pelaksanaan kegiatan pembangunan seringkali tidak melibatkan masyarakat sejak perencanaan hingga operasional.
- f. Kemampuan daerah untuk membiayai pengelolaan air limbah domestik rendah

3. Peluang (*Opportunities-O*)

- a. Adanya keinginan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana pelayanan terhadap persampahan.
- b. Tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan bersama di Kota Praya masih cukup tinggi
- c. Adanya sumber dana dari DAK dan Dana Perimbangan Pusat pada masing-masing dinas/instansi yang terkait pengelolaan air limbah domestik.
- d. Saat ini tingkat kepadatan penduduk masih rendah

4. Ancaman (*Threats-T*)

- a. Jumlah penduduk akan semakin bertambah dengan tingkat pertumbuhan penduduk tahun 1990-2000 sebesar 0,98%. Pertambahan penduduk ini berpotensi menghasilkan air limbah domestik yang lebih banyak
- b. Pemahaman masyarakat terhadap dampak air limbah domestik masih rendah sehingga pembuangan air limbah domestik jarang dipikirkan sebagai ancaman terhadap sumber daya air.

- c. Ketersediaan lahan semakin berkurang sebagai akibat kepadatan semakin bertambah sehingga dapat menyulitkan pengelolaan air limbah domestik di masa mendatang.
- d. Ketersediaan masyarakat untuk membiayai pengelolaan air limbah domestik rendah
- e. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Dari Analisa SWOT tersebut, selanjutnya diperoleh asumsi-asumsi yang diyakini akan memberikan alternatif solusi terhadap adanya peluang dan kegagalan, berupa pilihan-pilihan strategis dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi internal dan eksternal tersebut maka dapat disusun strategi untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman.

1. Strategi yang dapat dilakukan untuk menggunakan seluruh Kekuatan (S) untuk memanfaatkan Peluang (O).

Langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tupoksi terkait pengelolaan air limbah domestik dengan memanfaatkan sumber dana dari DAK atau APBN lainnya ($S_{ab} - O_a$)
- b. Meningkatkan peran pendampingan oleh LSM kepada masyarakat ($S_e - O_b$)
- c. Melaksanakan pengelolaan air limbah domestik sistem on-site dengan melibatkan peran serta masyarakat ($S_{ac} - O_{abcd}$)
- d. Mendorong peningkatan prioritas pendanaan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik

2. Strategi yang dapat dilakukan untuk menggunakan seluruh Kekuatan (S) dalam rangka menghindari Ancaman (T)

- a. Melaksanakan pengelolaan air limbah domestik sistem off-site dengan melibatkan peran serta masyarakat
- b. Meningkatkan peran *Tuan Guru* dan LSM peduli lingkungan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan persepsi masyarakat ($S_{de} - T_{bd}$)

- c. Melakukan penataan permukiman melalui penerapan perijinan mendirikan bangunan yang mempersyaratkan pengelolaan air limbah domestik ($S_{ac} - T_{ac}$)
3. Strategi untuk memanfaatkan Peluang (O) yang ada dengan cara mengatasi kelemahan-kelemahan (W) yang dimiliki
 - a. Peningkatan kualitas pengolahan air limbah domestik untuk melindungi sumber daya air dan lingkungan ($W_c - O_{abcd}$)
 - b. Mencari alternatif pembiayaan di luar APBD melalui kombinasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat ($W_f - O_{ac}$)
 - c. Meningkatkan koordinasi antar dinas/instansi ($W_{cd} - O_{abcd}$)
 4. Strategi untuk meminimalkan Kelemahan (W) yang ada serta menghindari Ancaman (T)
 - a. Menyusun Perda pengelolaan air limbah domestik termasuk Perijinan pembuangan air limbah domestik, penetapan kelas air sebagai acuan pemantauan dan pengawasan serta pengendalian pencemaran air beserta penerapan sanksi ($W_b - T_{abcd}$)
 - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik ($W_{ef} - T_d$)

4.4.4. Alternatif Kebijakan

Berdasarkan strategi-strategi tersebut maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan yang bisa dilaksanakan untuk mengatasi penyebab permasalahan pengelolaan air limbah domestik yang dihadapi guna mewujudkan tujuan yang diinginkan diantaranya sebagai berikut :

1. Alternatif Kebijakan dari Aspek Peningkatan Peran serta Masyarakat
 - a. Meningkatkan peran *Tuan Guru* dan LSM peduli lingkungan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan persepsi masyarakat
 - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
 - c. Meningkatkan peran pendampingan oleh LSM kepada masyarakat
2. Alternatif Kebijakan dari Aspek Kelembagaan dan Kebijakan

- a. Meningkatkan koordinasi antar dinas/instansi
 - b. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tupoksi terkait pengelolaan air limbah domestik dengan memanfaatkan sumber dana dari DAK atau APBN lainnya
 - c. Menyusun Perda pengelolaan air limbah domestik termasuk Perijinan pembuangan air limbah domestik, penetapan kelas air sebagai acuan pemantauan dan pengawasan serta pengendalian pencemaran air beserta penerapan sanksi
 - d. Peningkatan Pengelolaan air limbah domestik untuk melindungi sumber daya air dan lingkungan
 - e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan tupoksi
 - f. Melakukan penataan permukiman melalui penerapan perijinan mendirikan bangunan yang mempersyaratkan pengelolaan air limbah domestik
3. Alternatif Kebijakan dari Aspek Teknologi
 - a. Melaksanakan pengelolaan air limbah domestik sistem on-site dengan melibatkan peran serta masyarakat
 - b. Mendorong pengelolaan air limbah domestik sistem off-site secara bertahap dengan melibatkan peran serta masyarakat
 4. Alternatif Kebijakan dari Aspek Pembiayaan
 - a. Mendorong peningkatan prioritas pendanaan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik
 - b. Mencari alternatif pembiayaan di luar APBD melalui kombinasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat

4.4.5. Skala Prioritas Kebijakan/Rekomendasi

Berdasarkan pilihan-pilihan alternatif kebijakan tersebut di atas maka dapat disusun skala prioritas kebijakan berdasarkan skala prioritas.

1. Prioritas Pertama terdiri dari :
 - a. Penataan tupoksi kelembagaan di pihak pemerintah sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan melalui kegiatan sebagai berikut :

- Pembagian tugas dan fungsi yang jelas pada instansi teknis seperti instansi yang berperan selaku operator, fasilitator dan regulator
 - Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan air limbah domestik melalui peningkatan implementasi tupoksi yang sinergis dan pemantapan koordinasi di antara instansi terkait
 - Peningkatan peran Bapeda dalam mengkoordinir usulan instansi dan menyesuaikannya dengan tupoksi masing-masing.
- b. Penyusunan kebijakan dan peraturan yang akan menjadi dasar hukum dalam pengelolaan air limbah domestik melalui upaya-upaya sebagai berikut :
- Menyusun peraturan-peraturan daerah pengelolaan air limbah domestik yang mengintegrasikan upaya penyehatan lingkungan sekaligus dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya air dan fungsi lingkungan hidup.
 - Menetapkan Rencana Strategis Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dengan memberikan porsi yang proporsional terhadap pengelolaan air limbah domestik
2. Prioritas kedua, Peningkatan partisipasi masyarakat melalui beberapa upaya :
- Meningkatkan dan memperluas peran *Tuan Guru* sebagai panutan kuat masyarakat dengan memasukkan tinjauan pengelolaan air limbah domestik dari sisi agama dalam dakwahnya.
 - Melakukan pendampingan masyarakat oleh LSM peduli lingkungan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan persepsi masyarakat menuju masyarakat yang berdaya dan partisipatif
 - Melakukan pembinaan terhadap lembaga lokal melalui pelatihan-pelatihan
 - Melakukan perencanaan partisipatif yang benar-benar konsekuen sehingga perencanaan yang dibuat sesuai dengan *real needs* masyarakat bukan *felt needs* atau *expected needs*
3. Prioritas ketiga,

- a. Mendorong peningkatan prioritas pendanaan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik
- b. Melaksanakan pengelolaan air limbah domestik sistem *on-site* dalam jangka pendek dan merencanakan pengelolaan air limbah domestik sistem *off site* dalam jangka panjang dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Tabel 4.6 : MATRIK SWOT

<p>IFAS (Internal Strategic Factor Analysis Summary)</p> <p>EFAS (Eksternal Strategic Factor Analysis Summary)</p>	<p>STRENGTHS (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya dinas/instansi yang berkompeten terhadap air limbah domestik b. Adanya Tupoksi masing-masing dinas / instansi c. Adanya <i>Tuan Guru</i> sebagai tokoh panutan kuat masyarakat d. Adanya LSM Peduli Lingkungan e. Adanya lembaga lokal di masyarakat 	<p>WEAKNESSES (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Implementasi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing dinas/instansi sering tumpang tindih b. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah domestik c. Program penyehatan lingkungan belum terintegrasi dengan pengelolaan sumber daya air d. Pelaksanaan kegiatan pembangunan seringkali tidak melibatkan masyarakat sejak perencanaan hingga operasional e. Proses perencanaan dalam musrenbang belum sepenuhnya partisipatif f. Kemampuan daerah terbatas
<p>OPPORTUNITIES (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya sumber dana dari DAK dan Dana Perimbangan Pusat b. Adanya keinginan masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan air limbah domestik c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan bersama di Kota Praya masih cukup baik d. Tingkat kepadatan penduduk masih rendah 	<p>STRATEGI (S - O)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tupoksi terkait pengelolaan air limbah domestik dengan memanfaatkan sumber dana dari DAK atau APBN lainnya ($S_{ab} - O_a$) b. Meningkatkan peran pendampingan oleh LSM kepada masyarakat ($S_a - O_b$) c. Melaksanakan pengelolaan air limbah domestik sistem <i>on-site</i> dengan melibatkan peran serta masyarakat ($S_{ace} - O_{abcd}$) d. Mendorong peningkatan prioritas pendanaan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik ($S_{ab} - O_a$) 	<p>STRATEGI (W - O)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Pengelolaan air limbah domestik untuk melindungi sumber daya air dan lingkungan ($W_c - O_{abcd}$) b. Mencari alternatif pembiayaan di luar APBD melalui kombinasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat ($W_f - O_{ac}$) c. Meningkatkan koordinasi antar dinas/instansi ($W_{acd} - O_{abcd}$) d. Melakukan perencanaan partisipatif yang benar-benar konsekuen sehingga perencanaan yang dibuat sesuai dengan <i>real needs</i> masyarakat bukan <i>felt needs</i> atau <i>expected needs</i> ($W_{de} - O_{bc}$)
<p>THREATS (T)</p>	<p>STRATEGI (S - T)</p>	<p>STRATEGI (W - T)</p>

<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah penduduk semakin bertambah b. Pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap dampak air limbah domestik masih rendah c. Ketersediaan lahan cenderung semakin berkurang d. Kesiadaan masyarakat untuk membiayai pengelolaan air limbah domestik rendah e. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendorong pengelolaan air limbah domestik sistem <i>off-site</i> secara bertahap dengan melibatkan peran serta masyarakat ($S_{abcd} - T_{abcde}$) b. Meningkatkan peran <i>Tuan Guru</i> dan LSM peduli lingkungan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan persepsi masyarakat ($S_{cd} - T_{bde}$) c. Melakukan penataan permukiman melalui penerapan perijinan mendirikan bangunan yang mempersyaratkan pengelolaan air limbah domestik ($S_{ac} - T_{ac}$) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun Perda pengelolaan air limbah domestik termasuk Perijinan pembuangan air limbah domestik, penetapan kelas air sebagai acuan pemantauan dan pengawasan serta pengendalian pencemaran air beserta penerapan sanksi ($W_{ab} - T_{abcde}$) b. Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik ($W_{ef} - T_{de}$)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 4.7 Matrik Kondisi Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Permasalahannya serta Rekomendasi Pengelolaannya

No.	Pengelolaan air limbah domestik Kota Praya	Kondisi Existing	SNI/Pendapat Pakar/Hasil Penelitian terdahulu	1
1	2	3	4	
1.	Pola Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah	Sebagian besar masyarakat Kota Praya melakukan pengelolaan sendiri air limbah rumah tangga baik dengan membuang langsung ke kali (23,85%), saluran drainase kota, got atau halaman rumahnya (53,21%), lubang penampungan (31,19%) dan lainnya seperti menyiram halaman dan dibuang kesawah 11,93	Pembuangan limbah secara sembarangan akan beresiko terhadap pencemaran lingkungan. Perilaku masyarakat membuang air limbah tergantung kepada sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap resiko air limbah domestik	Tingkat kesadaran masyarakat akan dampak domestik dan di belum penget dampak yang b limbah bisa m daya a umum
		Pembangunan Septiktank sebanyak 2 unit dilaksanakan atas inisiatif pemerintah melalui KPMLH. Sejak perencanaan hingga selesai pembangunan proyek tidak melibatkan masyarakat (Hasil wawancara dengan aparat kelurahan Prapen, TOMA Prapen dan LSM)	Dalam menggerakkan perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, perencanaan partisipatif harus dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : (1) perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata (<i>felt need</i>), (2) dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban (<i>response</i>), dan (3) dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang berfungsi membangkitkan tingkah laku (<i>behavior</i>).	Partisipatif kurang dalam pemba

1	2	3	4	
2.	Kelembagaan Pengelola Air Limbah	Lembaga pengelola yang diminati masyarakat adalah Pengurus RT (78,90%) dengan alasan karena lebih dekat dengan mereka dan lebih tahu persoalan di bawah. Lembaga terkecil pengelola sarana pembuangan air limbah domestik system setempat adalah masing-masing keluarga dalam masyarakat untuk system individual.	Lembaga Pengelola dapat dilaksanakan oleh masyarakat (mandiri), masyarakat di bawah yayasan, pengurus tingkat:RT/RW dan kelurahan dengan kepengurusan berdasarkan kesepakatan masyarakat yang dilaksanakan dalam rembung warga. Bentuk-bentuk kelembagaan tergantung pada kondisi dan situasi kebutuhan yang ada di masyarakat. Lembaga terkecil pengelola sarana pembuangan air limbah domestik sistim setempat adalah masing-masing keluarga untuk system individual dan kelompok masyarakat pemakai untuk system komunal.	Bel per me ler me air
		Ditingkat Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Lembaga pengelola air limbah domestik belum begitu jelas. Yang sudah teridentifikasi ada 4 buah instansi terkait yaitu Dinas Kimpraswil, Dinas Kesehatan dan KPMLH dan Bapeda (hasil wawancara dengan informan pemerintah kabupaten). Pelaksanaan Tupoksi ketiga instansi yang pertama tersebut belum terpadu. Masing-masing melakukan tugas tanpa koordinasi yang baik. Septiktank komunal yang seharusnya dibangun oleh Dinas Kimpraswil di Kabupaten Lombok Tengah dibangun oleh KPMLH (Hasil wawancara dengan informan)	Ditingkat pusat yang berperan di samping Bappenas, Departemen Keuangan dan Depdagri, juga DepKes, Men.LH, Dep. Perindustrian, Dep.PU. Di tingkat daerah ada lembaga atau dinas di tingkat propinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.	Ko pel: terk pen dor Pra terf

1	2	3	4	
3.	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi masyarakat pada pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya terbatas pada gotong royong pembersihan drainase dalam kampung (41,28% responden). Kegiatan tersebut diprakarsai oleh ketua RT. Dilihat dari Keinginan berpartisipasi 35,78% dari responden menyatakan ingin berpartisipasi sejak perencanaan hingga operasional dan kapan saja dibutuhkan sebanyak 33,94% (potensial sejak perencanaan hingga operasional)	Penggalangan partisipasi itu dilandasi adanya pengertian bersama dan adanya pengertian tersebut karena di antara orang-orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam menggalang peran serta semua pihak itu diperlukan : (1) terciptanya suasana yang bebas atau demokratis, dan (2) terbinanya kebersamaan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.	Peran s masya sepenu manfaat pemer setiap pemba
4.	Pemilihan Teknologi Pengelolaan Air Limbah	Teknologi pengolahan air limbah yang ada sekarang di Kota Praya adalah pembuangan ke saluran drainase, got, disalurkan melalui pipa ke sungai / kali, dibuang ke pekarangan	Untuk menetapkan teknologi air limbah yang tepat banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Pada umumnya faktor-faktor tersebut berbeda untuk masing-masing daerah. Faktor-faktor tersebut adalah Kepadatan penduduk, Penyediaan air bersih, Keadaan tanah, Kedalaman muka air tanah, keadaan topografi, kemampuan membangun dan kondisi sosial masyarakat	Kondis kelihat beresik kualita air (su Waduk

1	2	3	4	
5.	Pembiayaan pengelolaan air limbah	Sebagian besar sarana pembuangan air limbah domestik seperti got/saluran drainase dan septiktank komunal dibiayai oleh pemerintah daerah, masyarakat tinggal memakai kecuali jamban keluarga sebagian besar atas biaya sendiri meskipun ada juga bantuan dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan. Untuk Septiktank komunal yang berada di Kelurahan Prapen pembiayaannya murni pemerintah dari dana perimbangan pusat	Aspek pembiayaan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan air limbah di samping aspek kelembagaan, aspek teknis operasional, aspek peran serta masyarakat serta aspek peraturan perundang-undangan tentang air limbah. Pembiayaan memegang kunci keberhasilan, pengelolaan air limbah dengan pembiayaan yang memadai maka tingkat pelayanan air limbah juga memadai serta dapat ditingkatkan terus	Ke Kal Ter me pen dor seh leb me per dal
6.	Peraturan perundang-undangan	Di Kabupaten Lombok Tengah belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan air limbah domestik seperti pengelolaan terhadap sampah. Perda Penetapan kelas air juga belum ada (hasil wawancara dengan informan pemerintah kabupaten)	Acuan normatif sebagai dasar hukum dalam pengelolaan air limbah domestik sangat diperlukan, karena suatu sistem tidak akan bisa berjalan efektif jika tidak didukung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai acuan normatif yang digunakan dalam pengelolaan air limbah adalah Undang-undang, Perda, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan adat/rembug warga	Pel pen dor ber Kal Ter

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis serta merujuk pada tujuan penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sistem pengelolaan air limbah domestik eksisting di Kota Praya sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya hanya sebatas pembuangan ke saluran drainase kota/got, pekarangan dan sungai/kali yang dilakukan karena tidak adanya pelayanan pengelolaan air limbah, tidak adanya larangan dan biayanya murah serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak air limbah domestik terhadap pencemaran air
 - b. Belum adanya peraturan daerah terkait pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya serta kinerja pemerintah yang masih rendah dalam pengelolaan air limbah domestik mengancam tercemarnya sumber daya air di Kota Praya.
 - c. Di tingkat pemerintah kelembagaan pengelolaan air limbah domestik belum melaksanakan tupoksi sesuai dengan yang diberikan sehingga sering terjadi tumpang tindih kegiatan antara instansi yang satu dengan yang lain
 - d. Pelaksanaan program sanitasi lingkungan di Kota Praya belum mengintegrasikan pengelolaan sumber daya air dan lingkungan
 - e. Pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik belum dilakukan secara partisipatif sehingga prasarana pengolahan air limbah domestik yang ada tidak dimanfaatkan oleh masyarakat padahal masyarakat menginginkan adanya partisipasi sejak perencanaan hingga operasional.
2. Berdasarkan hasil analisis SWOT maka langkah-langkah yang perlu dibenahi dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Praya adalah sebagai berikut :
 - a. Mengupayakan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem *on-site* karena dilihat dari aspek kepadatan penduduk, kedalaman air tanah, jenis tanah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta tingkat persepsi dan

partisipasi masyarakat, sistem *on-site* masih relevan tetapi ke depan pengolahan dengan sistem *off-site* terus diupayakan secara terencana dengan melibatkan peran serta masyarakat.

- b. Menyusun peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik yang bertujuan untuk melindungi sumber daya air dari pencemaran sekaligus untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
- c. Mengakomodir peran *tuan guru* sebagai panutan kuat masyarakat serta pendampingan oleh LSM dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.
- d. Mengupayakan mencari alternatif pembiayaan di luar APBD melalui kombinasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk menentukan teknologi pengolahan air limbah domestik dengan *sistem on-site* maupun *off-site* yang tepat di Kota Praya diperlukan kajian teknis sebab dalam penelitian ini lebih diutamakan pada partisipasi masyarakat dan kebijakan pemerintah.
2. Agar *Septik tank* komunal yang telah dibangun dapat berfungsi dengan baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat, maka perlu ditinjau kembali konstruksinya serta mengatur sistem pemeliharaan dengan melibatkan masyarakat pemanfaat.
3. Untuk menjamin keberhasilan pengelolaan air limbah domestik maka pelibatan masyarakat sejak perencanaan hingga operasional mutlak harus dilakukan.
4. Dalam rangka mengurangi volume limbah dengan berbagai beban pencemar yang dihasilkan maka perlu sosialisasi dan pendampingan masyarakat melalui peran *tuan guru* untuk senantiasa melakukan efisiensi penggunaan air dan bahan pembersih lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2001, Perencanaan Daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Air Limbah Domestik Bisa Pengaruhi Kualitas Air Sungai, [Jawa Pos, Surabaya](#), diakses tanggal 30 Mei 2008 pada halaman www.unair.ac.id
- Anies, 2006. Manajemen Berbasis Lingkungan Solusi mencegah dan Menanggulangi Penyakit Menular. Penerbit PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Arikunto S., 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta, Jakarta
- Arsito, D.A., 2004. Rejuvinasi Peran Perencana Dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif?. Disampaikan Dalam : Seminar Tahunan ASPI (Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia) Universitas Brawijaya, Malang Juli 2004. Teknik Planologi ITB.
- Asngari, 2001. Peranan Agen Pembaruan/Penyuluh Dalam Usaha Memberdayakan (*Empowerment*) Sumber Daya Manusia Pengelola Agribisnis. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.
- Bappenas, 2006. Indonesia Sanitation Sector Development Program Inception Report (Volume 2)_Annex 1 30
- Cahyono, B.Y., 2006. Metode Pendekatan Sosial Dalam Pembangunan Partisipatif. www.lppm.petra.ac.id/ppm/COP/download Diakses, 2 Januari 2008
- Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, 2002. Pengembangan Perencanaan Waduk Batujai Sebagai Obyek Wisata Kota, Praya.
- Departemen PU, 2007. Kriteria Teknis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah. Prosiding Diseminasi dan Sosialisasi NSPM Bidan PLP dan Penyusunan PJM, Mataram 29-30 Nopember 2007.
- Djajadiningrat, ST. dan Harsono H., 1991. Penilaian Secara Cepat Sumber-sumber Pencemaran Air, Tanah dan Udara. Gadjahmada University Press.
- Hadi, Sudharto P, 2005, Metodologi Penelitian Sosial : Kuantitatif, Kualitatif dan Kaji Tindak. Program Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro. Semarang.
- , 2005, Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Kantor PMLH Kabupaten Lombok Tengah, 2003. Data Base Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, Praya
- Khaeruddin, 1992. Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek Sosial; Sosiologi; Ekonomi; dan Perencanaan, Liberty. Yogyakarta.

- Kustiah, T.. 2005. Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Badan Penelitian dan Pengembangan. Departemen Pekerjaan Umum.
- Marganof, 2007. Model Pengendalian Pencemaran Perairan Di Danau Maninjau Sumatera Barat, Desertasi, Intitut Pertanian Bogor. www.damandiri.or.id , diakses tanggal 5 Agustus 2008.
- Mitchell B., Setiawan B., dan Rahmi D.H., 2007. Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan. Gadjah mada University Press. Yogyakarta.
- Mosher , A.T., 1965. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. Syarat-syarat Mutlak Pembangunan dan Modernisasi. Disadur oleh : Ir. S. Krisnandhi dan Bahrin amad. CV. Yasaguna. Jakarta
- Nawawi, H. Hadari, 1983, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada *University Press*, Yogyakarta
- Ndraha, T., 1990. Membangun Masyarakat Menyiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Rineka Cipta Jakarta.
- Purwanto, B., 2004. Sistem Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga di Kota Tangerang, Percik Vol. 5 Tahun I.
- Sa'id G. & Intan, A.H. 2001. Manajemen Agribisnis. Ghalia Indonesia
- Salim, A., 2006. Teori & Paradigma Penelitian Sosial, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Setiawan, 2005. Konsep, Instrumen dan Strategi Pengelolaan Lingkungan (Kumpulan Materi Kursus Dasar Pengelolaan Lingkungan Terpadu, 2005)
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan, 1982. Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta
- Slamet, M., 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. IPB Press, Bogor.
- Sugiarto, et Al, 2001, *Teknik Sampling*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sugiharto, 2005, Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah, UI Press, Jakarta
- Sumarwoto, Otto, 2004. Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press. UGM. Yogyakarta.
- Suriawiria, Unus. 1996. Air Dalam Kehidupan dan Lingkungan yang sehat. Penerbit Alumni Bandung.
- Suzetta, P. 2007. Perencanaan Pembangunan Indonesia. Menteri Negara. Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Diakses pada tanggal 3 Januari 2008 pada halaman www.bappenas.go.id
- Sudjarwo, 2001., *Metodologi Penelitian Sosial*, Mandar Maju, Bandung

Standar Nasional Indonesia Nomor SNI Pd-T-04-2005 Tentang Tata Cara
Perencanaan dan Pemasangan Tangki Biofilter Pengolahan Air Limbah
Rumah Tangga Dengan Tangki Biofilter, Badan Standar Nasional (BSN)